

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
(STUDI KASUS: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
KABUPATEN PAMEKASAN)**

Disusun Oleh:

**Amirah Rosalina
NIM. 135020307111011**

Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Bambang hariadi , M.Ec., Ak.

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Derajat Sarjana Ekonomi*



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2018**

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
(Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan)**

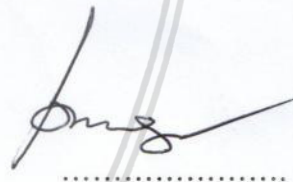
Yang disusun oleh:

Nama : Amirah Rosalina
NIM : 135020307111011
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

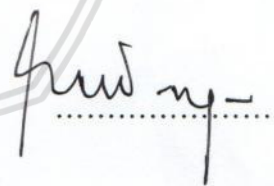
Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 22 Januari 2018 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Drs. Bambang Hariadi , M.Ec., Ak.
NIP. 195708131983031004
(Dosen Pembimbing)
2. Dr. Drs. Rosidi , Ak., MM.
NIP. 195403121984031001
(Dosen Penguji I)



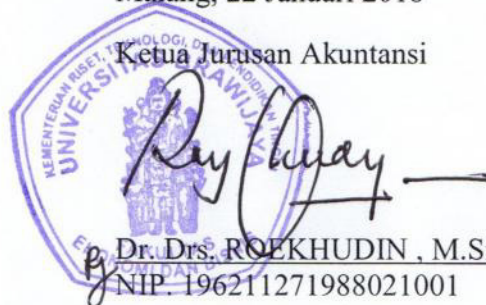
.....



.....

Malang, 22 Januari 2018

Ketua Jurusan Akuntansi



.....

Dr. Drs. ROEKHUDIN , M.Si., Ak.
NIP. 196211271988021001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amirah Rosalina
NIM : 135020307111011
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**
(Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan)

adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan bilamana diperlukan.

Malang, Januari 2018



Amirah Rosalina
NIM 135020307111011

CURRICULUM VITAE

AMIRAH ROSALINA

February, 13th 1995

Jalan Taman Bunga Merak Kav A4, Rt 09 Rw 02, Kecamatan
Lowokwaru, Malang

+62 852 219 149 49 / +62 858 435 464 10

rosalinaamirah@gmail.com



I. EDUCATION

Universitas Brawijaya (2013 - now)

Major, Consentration : Accounting, Bussines Accounting

SMAN 1 BANJAR (2010 - 2013)

SMPN 1 BANJAR (2007 - 2010)

SDN 2 BANJAR (2001 - 2007)

TAMAN KANAK-KANAN BHAYANGKARI (2000-2001)

II. LANGUAGE SKILLS

BAHASA INDONESIA Fluent

ENGLISH Good

DEUTSCH Not Perfect

III. ORGANIZATIONAL EXPERIENCE

2015 – 2016

As Head of Internal Departemen of In Box
Economics Of English

2012 – 2013

As Head of “Rubrik Harian” of Jurnalistik

IV. COMMITTEE EXPERIENCE

- 2015** As Food and Beverages Division Coordinator of ENGLISH FAIR, ICOSH FEB UB.
- 2014** As Medical Staff of INSPIRATION, KM FEB UB.
- As Food and Beverages Staff of Accounting Gathering, HMJA FEB UB.
- 2013** As Marketing Staff of Student Book Year, SMAN 1 BANJAR.

V. SKILL EXPERIENCE

- 2016** Microsoft Office Desktop Application, Universitas Brawijaya.
- 2015** System Accounting Programe, Economic and Business Faculty.
- 2013** Partisipan of National Symposium ECSOTIC, BEM FEB UB.
- Partisipan of Brawijaya Accounting Fair, HMJA FEB UB.
- Excelent Program during first semester 2013-2014, English Explosion Learning Center.

Abstrak

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016
(Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan)**

Oleh:

Amirah Rosalina

135020307111011

Dosen Pembimbing: Dr. Drs. Bambang hariadi , M.Ec., Ak

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang sifatnya lebih fleksibel dibandingkan dengan penelitian yang bersifat kuantitatif. Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *good governance* tidak terlaksana secara maksimal dengan 3 (tiga) sudut pandang pada prinsip *good governance*, yaitu prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

Kata kunci: Good Governance, Pendapatan Daerah

Abstract

**THE IMPLEMENTATION OF GOOD GOVERNANCE ON REGIONAL
INCOME MANAGEMENT IN THE BUDGET YEAR OF 2016
(A Case Study at Financial and Asset Management Board of Pamekasan)**

By:**Amirah Rosalina****135020307111011****Advisor: Dr. Drs. Bambang hariadi , M.Ec., Ak**

Abstract: The objective of this research is to study the implementation of good governance in the management of regional income at Financial and Asset Management Board of Pamekasan in the budget year of 2016. This study uses qualitative research because this type is more flexible than quantitative research. This study consists of 5 chapters, in which sub-chapters were written to provide a more detailed explanation. The results show that good governance, observed from three points of view i.e. effectiveness and efficiency, accountability, and transparency, in the management of regional income at Financial and Asset Management Board of Pamekasan in the budget year of 2016 is not implemented well.

Keyword: Good Governance, Regional Income

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Skripsi ini merupakan penyempurnaan atas kegiatan perkuliahan yang telah terjadi selama 5 (lima) tahun, dengan judul **“IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 (STUDI KASUS: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PAMEKASAN)”**.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai bahan evaluasi hasil kegiatan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Pamekasan, sekaligus sebagai proses pembelajaran dalam menulis suatu karya ilmiah. Saya menyadari bahwa aktivitas ini dapat berjalan dengan baik disebabkan dukungan dari banyak pihak.

Untuk itu saya merasa berkewajiban menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada saya dalam mengerjakan laporan kegiatan kuliah kerja nyata profesi.
2. Kedua orang tua saya, serta keluarga yang selama ini telah memberikan doa untuk saya setiap waktu.
3. Dr. Drs. Bambang hariadi , M.Ec., Ak. sebagai dosen pembimbing skripsi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
4. Dr. Drs. Rosidi , Ak., MM. sebagai dosen penguji skripsi di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
5. Pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun telah memberikan banyak dukungan atas penyelesaian laporan ini.

Saya akhiri kata pengantar ini dengan harapan semoga laporan ini dapat dimanfaatkan bagi banyak pihak. Amin

Malang, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan	9

BAB 2 TINJAUAN UMUM *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PAMEKASAN

2.1 Good Governance	
2.1.1 Pemahaman Governance	12
2.1.2 Pemahaman Good Governance	15
2.1.3 Prinsip-prinsip Good Governance	18
2.2 Pendapatan Asli Daerah	
2.2.1 Pemahaman Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	27
2.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan (BPKA)	
2.3.1 Tugas dalam Struktur Organisasi BPKA.....	28
2.3.2 Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	29
2.3.3 Sumber Daya BPKA	30
2.3.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi BPKA	
2.3.4.1 Visi BPKA	31
2.3.4.2 Misi BPKA.....	32
2.3.4.3 Tujuan BPKA	32
2.3.4.4 Sasaran BPKA.....	33
2.3.4.5 Strategi BPKA.....	33

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	
3.2.1 Sumber Data.....	36
3.2.2 Teknik Pengumpulan Data.....	37
3.3 Teknik Analisis Data	38

BAB 4 ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PAMEKASAN

4.1 Analisis Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan	
4.1.1 Definisi Umum Pendapatan	40
4.1.2 Pengakuan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan	41
4.1.3 Pengukuran dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan	42
4.1.4 Penyajian Pendapatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	43
4.1.5 Pihak-pihak yang Terkait dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	44
4.1.6 Deskripsi Prosedur Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan.....	50
4.2 Analisis Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Pendap	
4.2.1 Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi sebagai salah satu Penilaian Good Governance Daerah Kabupaten Pamekasan	
4.2.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	63
4.3 Implementasi Prinsip Akuntabilitas sebagai salah satu penilaian Good Governance.....	63
4.3.1 Akuntabilitas dalam Pengukuran Kinerja.....	65
4.3.2 Akuntabilitas Anggaran.....	66
4.4 Implementasi Prinsip Transparansi sebagai salah satu penilaian Good Governance	66
4.5 Permasalahan pada Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset.....	68

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan	73
5.2 Kritik / Saran	75
5.3 Keterbatasan Penelitian.....	77

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Indikator Prinsip Transparansi	21
Tabel 2.2 Indikator Prinsip Efektivitas dan Efisiensi	23
Tabel 2.3 Indikator Prinsip Akuntabilitas	24
Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.....	30



Daftar Gambar

Gambar 4.1 Website BPKA	67
-------------------------------	----



LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul;

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**
(Studi Kasus: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan)

Yang disusun oleh:

Nama : Amirah Rosalina

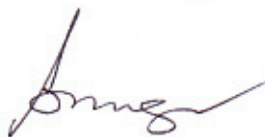
NIM : 135020307111011

Jurusan : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif.

Malang, Januari 2018
Dosen Pembimbing



Dr. Drs. Bambang Hariadi, M.Ec., Ak.

NIP 195708131983031004

Daftar Rujukan

- Abdul, Halim. 2009. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Tiga. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Akmal. 2009. *Sistem Pengendalian Internal*. Jakarta: Percetakan Penebar Swadaya.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka setia.
- David, Fred R. 2011. *Manajemen Strategis*. Jakarta: Salemba Empat
- Domai, Tjahjanulin. 2006. *Dari Pemerintahan ke Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Depdagri.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta; UGM Press.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi untuk Good Governance Lokakarya Reformasi Birokrasi*. Jakarta: Departemen Aparatur Negara.
- Hiro, Tugiman. 2006. *Standar Profesional Auditor Internal*. Yogyakarta: Kanisius.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kemala, Dian. 2011. *Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik*. Skripsi. Universitas Riau
- Krina, Lalolo. 2003. *Indikator dan Tolak Ukur Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS, Sekretariat Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik.
- Lexy, J Moleong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy, J Moleong. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- M, Ryan, Bakry. 2010. *Tesis Implementasi Hak Azasi Manusia Dalam Konsep Good Governance di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Murhaini, Suriansyah. 2008. *Kewenangan Pemerintah Daerah Mengurus Bidang Pertanahan*. Surabaya: Penerbit laksbang justitia, edisi 1 cetakan 1.
- Nana, Syaodih Sukmadinata. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Setiawan, Guntur. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Suryo Pratolo. 2006. *Pengaruh Audit Manajemen, Komitmen Manajer pada Organisasi, Pengendalian Intern terhadap Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan*. Disertasi. Program Pascasarjana Unpad.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Medpress.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Unsur-unsur Pengendalian Internal.

Rencana Strategi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. 2014.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 pasal 58 tentang Perbendaharaan Negara.

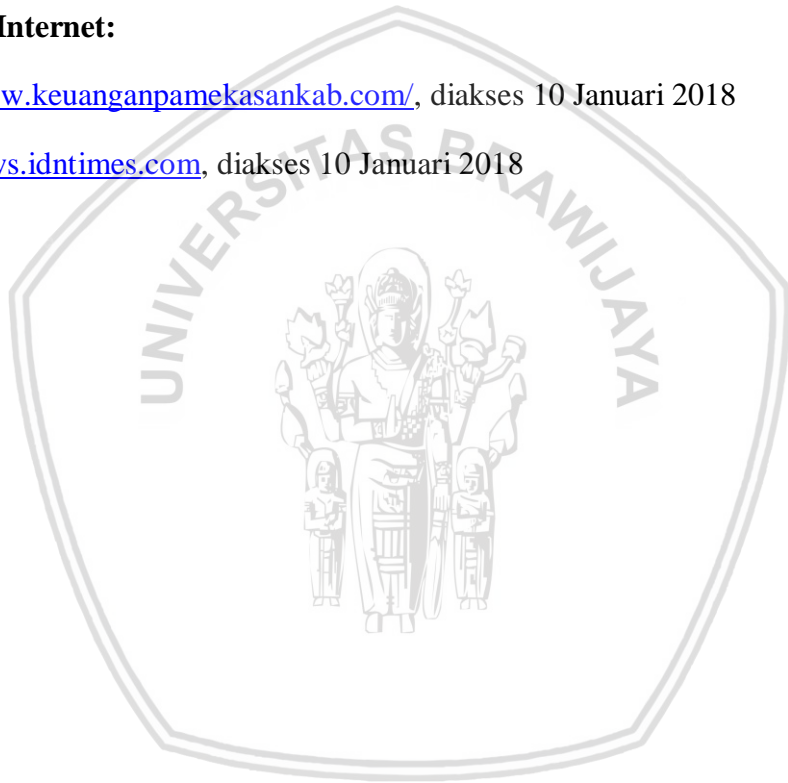
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rujukan Internet:

<https://www.keuanganpamekasankab.com/>, diakses 10 Januari 2018

<https://news.idntimes.com>, diakses 10 Januari 2018



Bab 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah, pemerintahan di Indonesia, baik pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, perlu menerapkan prinsip-prinsip *good governance* sebagai landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang baik. Dalam bukunya Sahya Anggara (2012:209) menjelaskan bahwa *governance* adalah suatu proses tentang pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan sistem kebijakan negara. *Governance* juga dapat diartikan sebagai pemerintahan. Jika dalam suatu kondisi, dimana dalam hal ini pemerintahan telah mampu menerapkan prinsip-prinsip yang keterkaitan dengan *good governance*, maka itu merupakan pemerintahan yang baik atau dikenal dengan istilah *good governance*.

Pada umumnya pemerintah daerah, dan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah diharapkan mampu mengimplementasikan *good governance* untuk memperbaiki kinerja dalam menjalankan pemerintahan. *Good governance* pada prinsipnya, menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen birokrasi pemerintah, baik pada tingkat pusat, maupun daerah. Perubahan paradigma ini akan menjadi lebih terarah untuk dapat menghasilkan suatu manajemen keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supermasi hukum di bidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintahan. Menurut Sahya Anggara (2012:209) mengatakan bahwa

good governance merupakan suatu konsep tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Dengan demikian, *good governance* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang mampu membangun dan menerapkan prinsip-prinsip seperti, profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di bidang keuangan negara.

Pemerintah Kabupaten Pamekasan sebagai bagian dari daerah otonom, secara konsisten dan optimal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kinerja. Pengelolaan atas pendapatan daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, harus bebas dari berbagai kepentingan, sehingga tidak ada permasalahan dalam hal transparansi, akuntabilitas, efektifitas maupun yang lainnya. Hal tersebut akan bersesuaian dengan tujuan awal dari dilaksanakannya otonomi daerah yaitu, untuk mensejahterakan masyarakat. Begitu peranan *good governance* sangat penting untuk diimplementasikan bagi pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan pada umumnya, dan khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan untuk mencapai tujuan tersebut. Mengapa *good governance* menjadi penting untuk diimplementasikan ? hal ini dikarenakan, sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat, dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam hal pengelolaan pendapatan daerah. Jika dalam suatu kondisi, pendapatan asli daerah tersebut tidak dikelola menggunakan prinsip-prinsip *good governance*, maka bukan tidak mungkin sumber-sumber pendapatan asli daerah di Kabupaten Pamekasan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Seperti halnya

korupsi, kurangnya pertanggungjawaban, tidak transparannya alokasi dana, dan lain-lain.

Berhubungan mengenai masalah pemerintahan di Indonesia, maka pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana dasar penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ?. Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mendasar pada asas desentralisasi yang memberikan kesempatan, dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pada hakikatnya, dengan adanya pemerintahan daerah, maka hal ini menjadi penting untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, dan efisien, serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia tidak terpisahkan dengan asas desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus segala urusan yang menyangkut pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berhubungan dengan distribusi anggaran, suatu proses distribusi anggaran dari pemerintah yang lebih tinggi kepada pemerintah yang lebih rendah untuk mendukung fungsi, dan atau tugas pemerintahan yang dilimpahkan dikenal dengan istilah desentralisasi fiskal. Hal ini dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan yang bisa memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sesuai dengan penjelasan di atas, kebijakan tentang desentralisasi keuangan menjadi konsekuensi tersendiri bagi pemerintah daerah dari adanya

kewenangan untuk mengelola keuangan secara mandiri. Hal ini berhubungan, ketika dalam suatu kondisi pemerintah daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran disektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain dari pendapatan yang sah. Sebenarnya apa itu pendapatan asli daerah ?. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah atau yang disingkat dengan PAD, merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Sumber pendapatan asli daerah salah satunya terdiri dari pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Tujuan dengan adanya pendapatan asli daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. (Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah)

Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Suriyansyah (2008:52) sistem pemerintahan daerah saat ini harus terus dibenahi, karena banyak sekali masalah-masalah di daerah sebagai dampak negatif dari pelaksanaan otonomi daerah. Peningkatan kualitas pengelolaan pemerintah daerah yang baik sangat dibutuhkan pada era otonomi daerah saat ini. Penjelasan tersebut, bersesuaian dengan tatanan atas sistem pemerintahan daerah yang disyaratkan oleh undang-undang. Bahwa otonomi daerah lebih diarahkan pada dua hal yaitu, bagaimana pemerintah daerah

harus mampu membenahi praktik-praktik kotor pada sistem yang telah dijalankan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan bagaimana mengendalikan tatanan sistem tersebut agar terus berjalan dengan baik, tidak terkecuali dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah.

Banyak pertanyaan yang kemudian muncul dari penulis untuk dapat melakukan kajian terhadap implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan daerah tahun anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Seperti halnya, bagaimana prosedur penerimaan dan pengeluaran yang terjadi atas pendapatan asli daerah ?. Apakah ada acuan baku atau pengendalian internal atas terjadinya penerimaan dan pengeluaran dari pendapatan asli daerah ?. Sudah sesuaikah prosedur yang dijalankan dengan acuan baku atau pengendalian internal yang ada ?. Sehingga pada akhirnya penulis dapat melihat bagaimana implementasi prosedur tersebut dengan sistem pengendalian internal atas pengelolaan pendapatan asli daerah, apakah masih terdapat penyimpangan ?. Jika ya, mengapa hal tersebut bisa terjadi ?. Jika tidak, maka berarti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan sudah dapat mengimplementasikan sistem pengendalian internal dengan baik yang dimana hal ini berhubungan erat dengan pelaksanaan *good governance* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

Mengapa sistem pengendalian internal memiliki hubungan terkait dengan pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah ?. Menyinggung sedikit mengenai masalah sistem pengendalian internal, jika hal ini ditelaah lebih mendalam kembali, maka akan nampak terlihat bahwa dengan adanya sistem pengendalian internal dalam sebuah organisasi, kemudian ini akan

menjadi pengawas internal bagi organisasi tersebut. Menurut Frederick (2011: 8) sistem pengendalian internal merupakan kebijakan-kebijakan, prosedur-prosedur, dan sistem informasi yang digunakan untuk melindungi aset-aset organisasi dari kerugian atau kegiatan korupsi, dan untuk memelihara keakuratan data keuangan. Sehingga, jika dikaitkan dengan tata kelola pemerintahan khususnya dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dapat dengan konsisten melakukan prosedur yang sudah ada, tanpa melakukan penyimpangan. Dalam penelitian terdahulu ternyata sudah banyak yang mengkaitkan hubungan antara sistem pengendalian internal dengan pelaksanaan *good governance*.

Seperti pada penelitian mengenai *good governance*, yang sebelumnya diteliti oleh Pratolo (2006) yang meneliti mengenai hubungan pengendalian internal, komitmen organisasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, menemukan bahwa lemahnya pengendalian manajemen akan berpengaruh secara kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*, dan kinerja. Dian Kemala (2011) juga meneliti, mengenai pengaruh pemahaman prinsip-prinsip *good governance*, pengendalian internal, dan komitmen organisasi terhadap kinerja sektor publik, hasil penelitiannya mengindikasikan organisasi berhasil dalam mencapai kinerja sektor publik dengan menggunakan pemahaman prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian internal. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal merupakan faktor pendukung untuk terlaksananya *good governance* dalam sebuah organisasi, utamanya pula pada obyek penelitian ini.

Penelitian ini, menekankan pada tiga prinsip yang paling signifikan yaitu efektivitas, dan/atau efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi. Penulis menilai

bahwa masih terdapat kasus ataupun fenomena pelaksanaan pengelolaan pendapatan asli daerah, pada khususnya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 yang bersinggungan dengan tiga prinsip tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut :

“IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN ANGGARAN 2016 (STUDI KASUS: BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN PAMEKASAN)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diawal, maka penulis mengambil satu perumusan pokok masalah yaitu, bagaimanakah Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan ?.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan umum dan tujuan khusus dilakukannya penelitian ini dengan topik Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dari dilakukannya penelitian ini dengan topik Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Asli

Daerah Tahun Anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan ilmu yang telah didapatkan sebelumnya di bangku kuliah, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam dunia pekerjaan, khususnya pada topik dan objek penelitian.
- 2) Memperoleh pengalaman dan pengetahuan tentang topik penelitian dalam dunia pekerjaan, khususnya di bidang akuntansi, dan mengetahui solusi yang dapat diberikan dalam permasalahan tersebut.

b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari dilakukannya penelitian ini dengan topik Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

- 1) Mengetahui sistem pengendalian internal yang telah diterapkan dalam pengelolaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2016 di Kabupaten Pamekasan,
- 2) Mengetahui prosedur yang dilakukan pada proses penerimaan dan pengeluaran dalam pengelolaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2016 di Kabupaten Pamekasan,
- 3) Mengetahui implementasi good governance dalam pengelolaan pendapatan asli daerah tahun 2016 di Kabupaten Pamekasan,

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan kesempatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam hal implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2016 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan,
- b. Bagi regulator, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran dan evaluasi mengenai implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah yang sebenarnya.
- c. Bagi manajemen, penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi tentang penerapan *good governance*, apakah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan sudah menerapkan *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah.
- d. Bagi kalangan akademisi dan peneliti berikutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian teoritis dan referensi.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif. Bagian pokok dari penelitian yang bersifat kualitatif lebih fleksibel bila dibandingkan dengan penelitian yang bersifat kuantitatif. Penyusunan bagian pokok penelitian kualitatif dapat terdiri lebih dari lima bab seperti pada ketentuan penelitian kuantitatif. Penyusunan skripsi kualitatif lebih mengutamakan bentuk penyusunan yang sedemikian rupa sehingga penyampaian makna hasil penelitian lebih efektif dan mudah untuk dipahami. Menurut Meleong (dalam Herdiansyah,

2010 : 9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial, secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.

Sistematika penulisan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap bab-nya. Pada bab kesatu penelitian ini yaitu, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah penelitian, perumusan pokok masalah dalam penelitian, kemudian tujuan dari pelaksanaan penelitian, manfaat penelitian yang dijabarkan secara teoritis dan praktis, dan terakhir mengenai sistematika penulisan dalam penelitian ini.

Bab kedua penelitian ini, membahas mengenai tinjauan umum *good governance*, pendapatan daerah, dan pembahasan mengenai sistem pengendalian internal yang merupakan faktor pendukung pelaksanaan *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Selanjutnya pada bab ketiga, dipaparkan mengenai metodologi yang diterapkan penulis dalam penelitian.

Pada bab keempat penelitian ini, membahas mengenai analisis implementasi *Good Governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Pada bab kelima penelitian ini yaitu pembahasan akhir, terdiri atas kesimpulan penelitian ini, keterbatasan yang terjadi selama penelitian ini, dan saran untuk penelitian berikutnya. Kesimpulan pada penelitian ini, merupakan intisari dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan sumber data. Metode tersebut antara lain menggunakan jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan dengan informan penelitian yaitu pejabat berkaitan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Penelitian kualitatif ini menggunakan jenis analisis data yaitu deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran atas sebuah permasalahan dengan melalui kegiatan analisis data penelitian.





Bab 2

Tinjauan Umum *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pameekasan

2.1 *Good Governance*

2.1.1 Pemahaman *Governance*

Konsep *governance* bukanlah konsep baru, konsep *governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (dalam Setiawan, 2004:223), *governance* merupakan suatu terminologi yang digunakan untuk mengganti istilah *government*, yang menunjuk penggunaan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Dalam pemahaman lain, istilah *governance* membantah mengenai pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. *Governance* mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda (Winarno, 2002:122).

Dalam bukunya Kooiman (Setiawan, 2004:224) menjabarkan bahwa *governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah, dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam bukunya dijelaskan pula, bahwa *governance* merupakan mekanisme-mekanisme, proses-proses, dan institusi-institusi melalui warga negara yang mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka, serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Dalam konteks ini, *governance* memiliki hakikat yang sesuai, yaitu bebas dari

penyalahgunaan wewenang, dan korupsi serta dengan pengakuan hak berlandaskan pada pemerintahan hukum. Konteks lain menjelaskan bahwa *governance*, dapat dikatakan sebagai proses pengambilan keputusan, dan proses yang mana keputusan tersebut diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya, serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *coorporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance* (Mardiasmo, 2002:14).

Konsep *governance* jika dijabarkan akan lebih inklusif dibandingkan dengan *government*. Konsep *government* menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi negara (negara dan pemerintah). Sedangkan untuk konsep *governance*, melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara tapi juga peran berbagai pelaku di luar pemerintahan dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangatlah luas. Lebih lanjut dikemukakan bahwa *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non pemerintah dalam suatu kegiatan kolektif. Menurut Sofian Efendi (2005:2) menjelaskan bahwa istilah *governance* sebenarnya sudah dikenal dalam literature administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun yang lalu. Tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam konteks pengelolaan organisasi korporat dan lembaga pendidikan tinggi. Wacana tentang *governance* yang baru muncul sekitar beberapa tahun belakangan ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional mempersyaratkan *good governance* dalam berbagai program

bantuannya. Oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, *term good governance* diterjemahkan menjadi penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab, dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih.

Perbedaan yang paling pokok antara konsep *government* dan *governance* terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu bangsa. Konsep *government* berkonotasi bahwa peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas negara. Sedangkan dalam *governance* mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan, dan mengelola sumber daya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep *governance* terkandung unsur demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipasi, dan kemitraan. Kemudian secara implisit, kata *good* dalam *good governance* sendiri mengandung dua pengertian, kesatu, nilai yang menjunjung tinggi kehendak rakyat dan nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan kemandirian dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. (Tjahjanulin Domai, 2006:6)

Penjelasan di atas tersebut dapat ditarik sebuah pemahaman, bahwa *governance* yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme,

proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutamakan kepentingan umum, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan diantara mereka.

2.1.2 Pemahaman *Good Governance*

Istilah *good governance* berasal dari induk bahasa Eropa, Latin, yaitu *Gubernare* yang diserap oleh bahasa Inggris menjadi *govern*, yang berarti *steer* (menyetir, mengendalikan), *direct* (mengarahkan), atau *rule* (memerintah). Penggunaan utama istilah ini dalam bahasa Inggris adalah *to rule with authority*, atau memerintah dengan kewenangan. *Governance* pada dasarnya pertama kali digunakan adalah di dunia usaha atau korporat. Manajemen profesional yang diperkenalkan pasca perang dunia II dengan prinsip dasar “memisahkan kepemilikan dengan pengelolaan”, benar-benar menjadikan setiap korporat menjadi usaha-usaha yang besar, sehat, dan menguntungkan. Gerakan ini dimulai secara besar-besaran di Amerika, khususnya setelah para titians *entrepreneur* mengalami kegagalan besar dalam mempertahankan gerakan tersebut, demi kelangsungan bisnisnya. Salah satu contohnya adalah Henry Ford II gagal mempertahankan kebesaran bisnisnya, karena ia tidak mengenal manajemen profesional.

Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, disebabkan oleh penyelenggaraan pemerintahan yang tidak dikelola dan diatur dengan baik. Akibatnya timbul berbagai masalah seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sulit diberantas, masalah penegakan hukum yang sulit berjalan, monopoli dalam kegiatan ekonomi, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang memburuk. Sehubungan dengan hal itu, sebuah konsep baru yang semula diperkenalkan

lembaga-lembaga donor international, yaitu konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*), yang dimana sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Konsep ini pertama kali diusulkan oleh Bank Dunia (*world bank*), *United Nations Development Progame* (UNDP), dan kemudian banyak pakar di negara-negara berkembang bekerja keras untuk mewujudkan gagasan-gagasan, baik menyangkut tata pemerintahan tersebut berdasarkan kondisi lokal dengan mengutamakan unsur-unsur kearifan lokal. (Agus Dwiyanto, 2006:78)

Lahirnya *good governance* pada era awal tahun 1990-an, oleh organisasi internasional khususnya yang bergerak dalam bidang bantuan keuangan dan pembangunan, telah menerapkan konsep baru sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan keuangan, dan bantuan bagi negara-negara yang membutuhkan. Diterapkannya konsep *good governance* sebagai syarat oleh lembaga-lembaga donor misalnya PBB, Bank Dunia, maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal. Menurut Kjoer dan Klavs (dalam Ryan Bakry, 2010:65) menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor dalam menerapkan syarat tersebut, yaitu kesatu, pengalaman yang dimiliki oleh lembaga-lembaga donor dalam mengimplementasikan program peningkatan structural (*structural adjustment programmer*) bahwa memperkuat kapasitas dari lembaga-lembaga pemerintah adalah sangat diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan yang stabil. Kedua, setelah berakhirnya perang dingin, dan jatuhnya sistem ekonomi, dan politik negara komunis yang menunjukkan bahwa terlalu besar jumlahnya aparatur negara dan tidak efisien, sehingga ini berimbas pada kegagalan ekonomi dalam pemerintahan tersebut. Ketiga, perkembangan ekonomi yang luar biasa terhadap

negara jepang, “*si negara aktif*” yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Ketiga faktor tersebut dijadikan dasar oleh masing-masing organisasi internasional tersebut dalam mengartikan *good governance*, sehingga batasan mengenai *good governance* masih belum baku. Beberapa organisasi mengindikasikan konsep *good governance* sebagai referensi makro ekonomi sedangkan organisasi internasional yang lain menjadikan ini hak asasi manusia, dan negara hukum sebagai batasan negara atas terlaksananya konsep *good governance*. Perbedaan pemahaman konsep mengenai *good governance*, dijelaskan pula (Jan Wouters dan Cedric Ryngaert, 2005:69) sebagai berikut “*The broadening of its fields of application is attributable to the fact that the good governance discourse has moved beyond its strictly macro-economic core*”. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa batasan-batasan tentang *good governance* telah berkembang sedemikian pesat sehingga bukan hanya tentang makro ekonomi saja tetapi luas lagi yaitu hak asasi manusia dan negara hukum. Tata pemerintahan yang baik dalam dokumen *United Nations Development Programme* (UNDP) adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara warga dan kelompok masyarakat. (Lalolo Krina, 2003:1)

Secara konseptual *good governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat

mutlak bagi terwujudnya *good governance*. Hal ini berdasarkan pada adanya tanggung jawab, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Idealnya ketiga hal ini akan ada pada diri setiap pelaku institusional, dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah *governance*. *Good governance* menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang per orang atau kelompok tertentu.

2.1.3 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menerapkan 3 dari 9 prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Tiga prinsip tersebut adalah transparansi, efisiensi dan/atau efektifitas, dan akuntabilitas. Mengapa peneliti hanya menggunakan 3 prinsip dalam penelitian ini ?. Hal ini dikarenakan 3 prinsip yang akan dijelaskan berikut, erat kaitannya dengan topik penelitian yang membahas mengenai pendapatan asli daerah (PAD). Berdasar pada arti, dan/atau maksud dari adanya pendapatan asli daerah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atas penggunaan, dan pengelolaannya, maka pemerintah mempunyai rasa tanggung jawab untuk dapat melaporkannya kepada masyarakat sesuai hasil yang didapat. Jika peneliti menggunakan kesembilan prinsip yang ada, maka keterkaitannya dengan fokus topik penelitian menjadi tidak berkesuaian. Seperti pada prinsip supremasi hukum dimana kerangka hukum yang ada, harus adil dan diberlakukan tanpa pandang

bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Kemudian pada prinsip berorientasi pada konsensus yang mana tata pemerintahan yang baik dapat menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda, demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan apabila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Sedangkan untuk masalah pengelolaan pendapatan asli daerah, dalam hal ini BPKA tidak memberlakukan perbedaan atas bagaimana penatausahaan, penggunaan, serta pelaksanaan pendapatan asli daerah untuk kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsip kesetaraan, dan/atau keadilan dimana semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka ini tidak berkesesuaian dengan bagaimana pengelolaan PAD.

Lain halnya dengan prinsip visi strategis, dimana para pemangku kebijakan, dan masyarakat memiliki perspektif yang luas, dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik, dan pembangunan manusia atas dasar perspektif kesejarahan, dan budaya. Dalam hal ini BPKA, memang memiliki visi yang berstrategis namun dalam maksud pengelolaan pendapatan asli daerah tidak digunakan dasar perspektif kesejarahan, dan budaya. Selanjutnya prinsip partisipasi masyarakat, maksud dari prinsip ini semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Dalam pengelolaan PAD partisipasi masyarakat tidak begitu besar andilnya, partisipasi masyarakat yang sebatas sebagai pengawas atas kebijakan yang telah

dibuat, dan dilaksanakan oleh BPKA. Berikut 3 (tiga) prinsip yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu;

1. Prinsip Transparansi

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2002), menyebutkan transparansi adalah prinsip dalam terlaksananya *good governance*, yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan atas kebijakan tersebut, serta hasil-hasil yang telah dicapai. Menurut *Transparency International*, undang-undang *Freedom of Information* (FOI) dalam prinsip transparansi, tidak hanya mengatur tentang hak publik untuk mengakses informasi tetapi juga menekankan pada obligasi pemerintah untuk memfasilitasi akses tersebut (Krina, 2003:19).

Dalam prinsip transparansi terdapat tiga aspek yang menjadi indikator terlaksananya *good governance*, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuan dari prinsip transparansi dalam terlaksananya *good governance*, yaitu

- a. Membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik, dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan

- b. Adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan
- c. Adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat
- d. Menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289).

Tabel 2.1 Indikator Prinsip Transparansi

Dimensi	No	Indikator
Transparansi (<i>Transparency</i>)	1	Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik.
	2	Adanya akses pada informasi yang siap, mudah dijangkau, bebas diperoleh dan tepat waktu.
	3	Bertambahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.
	4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
	5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Sumber: Sedarmayanti, (2009:290)

Prinsip transparansi memiliki mekanisme kerja yang merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman dalam menerapkan prinsip transparansi. Secara ringkas, mekanisme dalam penerapan prinsip transparansi mencakup hal-hal berikut;

- a. Adanya suatu jaminan dalam sistem keterbukaan dan standarisasi dari semua proses pelayanan publik

- b. Memfasilitasi pertanyaan-pertanyaan publik tentang berbagai kebijakan dan pelayanan publik maupun proses-proses didalam sektor publik
- c. Adanya fasilitas pelaporan maupun penyebaran informasi publik (kebijakan atau program kerja) maupun penyimpangan tindakan aparat publik didalam kegiatan melayani masyarakat (Krina, 2003:21).

2. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Good governance dapat diartikan sebagai suatu mekanisme pengelolaan sumber daya dengan substansi dan implementasi yang diarahkan untuk mencapai pembangunan yang efisien dan efektif secara adil. Salah satu prinsip dari good governance adalah efektivitas. Secara etimologis, efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya memiliki efek, pengaruh atau akibat. Untuk mengukur keefektifan organisasi dapat ditinjau dari kemampuan organisasi mengelola sumber daya yang ada dan memberikan nilai tambah kepada sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi. Suatu pemerintah daerah yang efektif adalah pemerintah daerah yang mampu memberikan pelayanan yang responsif sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Agar dapat meningkatkan kinerjanya, tata pemerintahan membutuhkan dukungan struktur yang tepat.

Tidak hanya efektivitas, melainkan efisiensi juga suatu prinsip dari good governance. Efisiensi sendiri adalah sesuai dengan anggaran dan waktu yang telah ditetapkan. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari, cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut Apabila membicarakan efektivitas dan efisiensi

maka harus dihubungkan dengan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan tersebut. (Sedarmayanti, 2009:290)

Tabel 2.2 Indikator Prinsip Efektivitas dan Efisiensi

Dimensi	No	Indikator
Efektivitas dan Efisiensi	1	Terlaksananya administrasi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan tepat sasaran dengan penggunaan sumberdaya yang optimal.
	2	Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan.
	3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
	4	Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi / unit kerja.

Sumber; Sedarmayanti, (2009:292)

3. Prinsip Akuntabilitas

Dalam hal terlaksananya *good governance*, prinsip akuntabilitas menjadi sebuah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab, dan menerangkan kinerja dan/atau tindakan seseorang, badan hukum dan/atau pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan/atau berkewenangan untuk meminta keterangan dan/atau pertanggungjawaban (Adisasmita, 2011:89). Selanjutnya (Sedarmayanti, 2009:291), akuntabilitas yakni adanya pembatasan dan pertanggungjawaban tugas yang jelas. Akuntabilitas merujuk pada pengembangan rasa tanggung jawab publik bagi pengambil keputusan di pemerintahan, sektor privat, dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana halnya kepada pemilik (*stakeholder*). Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan keuangan tahunan.

Prinsip akuntabilitas menghendaki bahwa setiap pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dapat, dan wajib dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat, dan para

pihak yang terkait sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Pertanggungjawaban kepada masyarakat disamping merupakan kewajiban adalah juga sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan UUD 1945. Prinsip ini menekankan bahwa semua kegiatan dan hasil akhir yang dicapai harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat secara benar dan jujur dengan dukungan data atau informasi yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh besar dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Oleh karena good governance berpegang pada prinsip akuntabilitas, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Tabel 2.3 Indikator Prinsip Akuntabilitas

Dimensi	No	Indikator
Akuntabilitas (Accountability)	1	Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan.
	2	Adanya sanksi yang ditetapkan pada setiap kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan.
	3	Pembuatan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan penyelenggaraan negara kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
	4	Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.
	5	Berkurangnya kasus-kasus KKN.

Sumber: Sedarmayanti, (2009:293)

Prinsip akuntabilitas memiliki mekanisme kerja yang merupakan cara kerja, aturan-aturan, atau pedoman dalam menerapkan prinsip partisipasi. Secara

ringkas, mekanisme dalam penerapan prinsip akuntabilitas mencakup hal-hal berikut:

- a. Pembuatan sebuah keputusan dan laporan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan.
- b. Pembuatan keputusan sudah memenuhi standar etika dan nilai-nilai yang berlaku, artinya sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar maupun nilai-nilai yang berlaku di stakeholders.
- c. Adanya kejelasan dari sasaran kebijakan yang diambil, dan sudah sesuai dengan visi dan misi organisasi, serta standar yang berlaku.
- d. Adanya ketentuan untuk menjamin bahwa standar telah terpenuhi, dengan konsekuensi ketentuan pertanggungjawaban jika standar tersebut tidak terpenuhi.
- e. Konsistensi maupun kelayakan dari target operasional yang telah ditetapkan maupun prioritas dalam mencapai target tersebut (Krina, 2003:24).

2.2 Pendapatan Asli Daerah

2.2.1 Pemahaman Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendapatan asli daerah didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat penjelasan lanjut untuk Undang-Undang tersebut, yaitu pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya tidak cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal

ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dijelaskan bahwa dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif khususnya pendapatan asli daerah sendiri.

Hal lain mengemukakan, pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Halim, 2004:94). Sektor pendapatan ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan

pembangunan daerah. Ahmad Yani (2002) juga menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan di awal dapat ditarik sebuah pengertian mengenai pendapatan asli daerah, yang merupakan pendapatan yang dikelola oleh pemerintah dengan dasar prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, dan tetap berdasar pula pada perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 yaitu:

- a. Pendapatan asli daerah.
- b. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

2.3 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan (BPKA)

2.3.1 Tugas dalam Struktur Organisasi BPKA

Lingkup tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan dan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, serta Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 45 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 53 Tahun 2008 sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas Kepala Dinas Membantu Bupati dalam melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian pengelolaan dan pengendalian dibidang perbendaharaan, akuntansi, pendapatan, belanja dan asset daerah.

b. Sekretaris

Tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, koordinasi program dan perencanaan serta keuangan.

c. Kepala Bidang Pendapatan

Tugas melaksanakan pendataan potensi, pendaftaran, pendapatan dan penagihan, serta pengendalian pendapatan daerah.

d. Kepala Bidang Belanja

Tugas melaksanakan penyusunan atau perumusan kebijakan dan pelaksanaan anggaran, pembendaharaan belanja pegawai, belanja barang atau jasa, belanja modal, belanja hibah, belanja bantuan dan belanja tak terduga, serta pembiayaan.

e. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Tugas melaksanakan penyusunan rumusan kebijakan akuntansi, pengelolaan kas bendahara umum daerah, evaluasi, dan pelaporan.

f. Kepala Bidang Aset Daerah

Tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan aset daerah.

2.3.2 Sistem, Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sistem Prosedur dan Mekanisme Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada :

- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Berikut mekanisme kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan asset daerah sebagai SKPD:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tahun berikutnya.
- b. Menyusun laporan keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- c. Menyusun laporan inventaris barang Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset.
- d. Penyusunan APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan.
- e. Melaksanakan pendataan potensi, pendaftaran, penetapan dan penagihan serta pengendalian pendapatan daerah.

2.3.3 Sumber Daya BPKA

Adapun sumber daya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan
(Berdasarkan Tingkat Pendidikan)

No	Jabatan	S2	S1	D1	SMA	SMP	SD
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris	1					
3	Kepala Bidang	2	2				
4	Kepala Subag / Seksi	1	15		7		
5	Staff	2	9	5	53	2	9
6	Honorar		2		40	4	2

Sumber: Rencana Strategi BPKA, 2014:11

Disamping itu, untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan, perlu ditunjang adanya kelengkapan sarana dan prasarana yang ada. Antara lain :

- a. Gedung Kantor (1 unit)
Dinas Pendapatan
Kabupaten Pamekasan.
- b. 13 Lokal Pasar Daerah
(13 lokal).
- c. 1 Kompleks Pertokoan
Citra Logam Mulia.
- d. 1 Kompleks Pertokoan di
Pasar Sore Baru.
- e. 3 Mobil Dinas.
- f. 36 Unit Sepeda Motor
Dinas.
- g. 2 unit Kereta Kelinci.
- h. 47 Unit Komputer.
- i. 12 Unit Laptop.
- j. 5 Unit Mesin Tik.

2.3.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi BPKA

2.3.4.1 Visi BPKA

Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tidak dapat lepas dari ruang lingkup visi pemerintah Kabupaten Pamekasan, karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan perangkat daerah di Bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan juga merupakan elemen penting di dalam suksesnya pencapaian visi pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebut. Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset yang ditetapkan adalah **"Terwujudnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan Sebagai Pendukung Utama Pengelolaan APBD dan Mampu Memberikan Pelayanan Maksimal Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat"**.

Kata kunci dari Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tiada lain adalah Bagaimana agar profesionalisme didalam mengelola

pendapatan pengelolaan keuangan dan aset dapat terwujud. Artinya pengelolaan pendapatan keuangan dan aset harus dikelola oleh aparatur yang kompeten dan profesional sesuai dengan bidangnya yang diharapkan dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keuangan. Sedangkan visi dapat berjalan sesuai dengan harapan apabila seluruh rangkaian dari misi, program, kebijakan, tujuan dan sasaran dapat berjalan secara kongkrit dan mendukung sesuai tahapan-tahapan rencana strategis.

2.3.4.2 Misi BPKA

Misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Administrasi Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah Yang Profesional, Transparan, Akuntabel dan auditable.
- b. Meningkatkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang Terukur dan Berkualitas.
- c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme personil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- d. Mengamankan dan memanfaatkan aset daerah melalui sistem pengelolaan yang efisien.

2.3.4.3 Tujuan BPKA

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dan pencapaian target-target ini merupakan ukuran keberhasilan kinerja suatu organisasi. Berdasarkan hal yang berpangkal Kepada Visi, Misi dan faktor-faktor penentu keberhasilan yang telah digariskan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan dengan menetapkan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Meningkatkan pendapatan daerah.
- c. Meningkatkan kualitas Sistem dan sarana pengamanan asset daerah.
- d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia.

2.3.4.4 Sasaran BPKA

Dalam upaya untuk mencapai tujuan, ditetapkan sasaran pelaksanaan kegiatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan sebagai berikut:

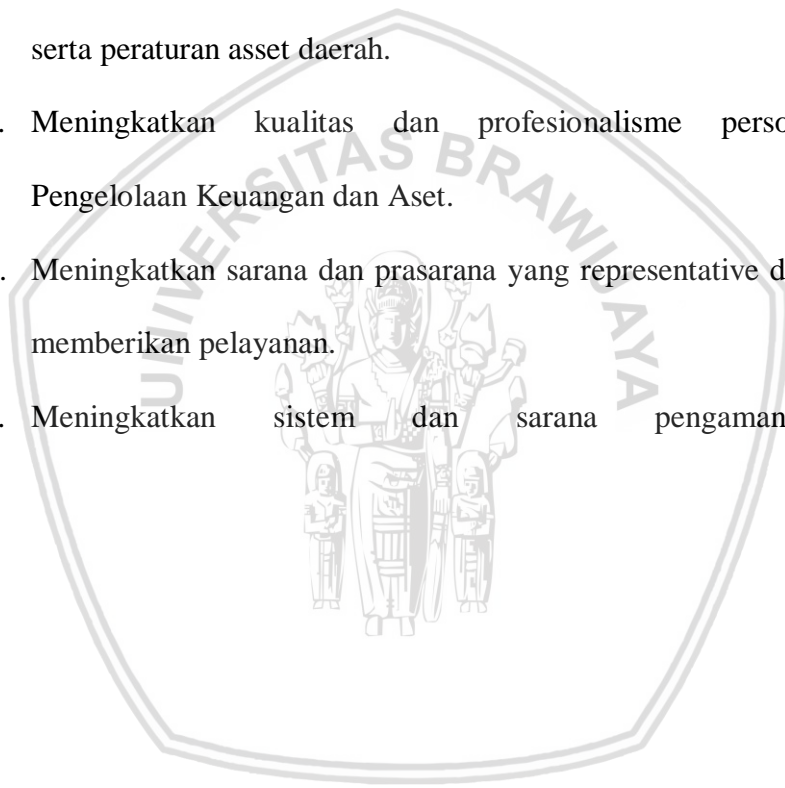
- a. Meningkatnya tertib administrasi perkantoran;
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai /memenuhi syarat;
- c. Meningkatkan tertib administrasi keuangan daerah;
- d. Keterbukaan informasi tentang APBD bagi publik;
- e. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Daerah;
- f. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sumber pendapatan yang memadai
- g. Ketersediaan Sarana dan prasarana pengamanan asset daerah
- h. Meningkatnya Disiplin, Etos Kerja dan Kualitas SDM

2.3.4.5 Strategi BPKA

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan kedalam kebijakan dan program. Program kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tidak lepas dari Prioritas pembangunan Kabupaten

Pamekasan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pamekasan yang diarahkan pada:

- a. Meningkatkan infrastruktur pendukung pelaksanaan tugas antara lain penyesuaian
- b. Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Pedoman Umum, serta sistem dan prosedur tentang penyusunan APBD, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, ketetapan pajak dan retribusi daerah serta peraturan asset daerah.
- c. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme personil Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana yang representative dalam rangka memberikan pelayanan.
- e. Meningkatkan sistem dan sarana pengamanan asset.





Bab 3

Metodologi Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan termasuk pada penelitian yang bagaimana yang digunakan oleh penulis. Metode penelitian kualitatif, atau yang sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik adalah metode yang diterapkan oleh peneliti. Hal ini karena dalam proses penelitiannya, dilakukan pada kondisi yang alamiah. Jenis penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang alamiah dimana berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dan kehadiran peneliti tidak begitu mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memecahkan masalah dengan menggambarkan problematika yang terjadi. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa peneliti ingin memahami, mengkaji secara mendalam, serta memaparkannya dalam tulisan ini mengenai implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah Kabupaten Pamekasan, serta masalah-masalah yang ditemukan, dan jalan keluarnya dalam rangka terciptanya optimalisasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang baik, berdaya guna dan berhasil guna. Demikian dengan adanya tujuan tersebut, maka relevan jika penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendapat Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1988 : 2) menerangkan bahwa penelitian kualitatif yang selama ini diterapkan dapat dijadikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati untuk selanjutnya. Menurut mereka pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara

holistik (utuh). Jadi penelitian ini, tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Metode deskriptif menjadi salah satu pilihan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Tipe penelitian ini berusaha menerangkan bagaimana peristiwa sosial yang terkait dengan permasalahan dapat diungkap dalam penelitian ini oleh peneliti. Tujuan dari penelitian kualitatif dengan metode deskriptif, ialah mendefinisikan suatu keadaan atau fenomena secara apa adanya (Sukmadinata, 2009). Berdasarkan Uraian di atas dapat ditarik sebuah simpulan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan analisis data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan, dan mempertimbangkan pendapat orang lain yang dihasilkan dari interview atau wawancara dengan narasumber atau informan yang bersangkutan..

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 2 (dua) sumber data yang dapat mendukung ketercapaian hasil penulis dari penelitian kualitatif ini, yaitu: data primer, dan sedikit dukungan data sekunder. Perbedaan ini dapat dilihat pada penjelasan berikut. Data primer dalam hal ini ialah data yang diperoleh atau didapati langsung di lapangan oleh peneliti sebagai bahan permasalahan dalam penelitian ini. Salah satu sumber data primer pada penelitian kualitatif ini, berdasar pada teks hasil wawancara yang diperoleh melalui proses wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitian. Dalam hal ini wawancara, telah dilakukan dengan 2 pejabat di Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Kabupaten Pamekasan. Narasumber kesatu ialah Bapak Drs. Bachtiar Effendy, M.Si dimana beliau menjabat sebagai sekretaris umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, kemudian narasumber kedua ialah Bapak Sahrul Munir, S.Sos, M.M yang dimana beliau menjabat sebagai kepala bidang akuntansi dan pelaporan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Selama penelitian berlangsung pula, data yang diperoleh dari informan telah direkam atau dicatat oleh peneliti. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari data-data yang sudah tersedia, dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, dan/atau mendengarkan. Pada intinya penulis menyimpulkan, bahwa jenis data yang dapat digunakan pada penelitian kualitatif ini dapat berupa apa saja, termasuk dalam hal ini kejadian-kejadian, atau gejala-gejala yang tidak menggambarkan hitungan, angka, atau kuantitas dari sebuah data.

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Berbicara mengenai data yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian di lapangan, diperoleh hasil data berupa kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan bidang permasalahan yang sedang diteliti. Lainnya yaitu penjabaran sistem yang selama ini dibuat, dan dipergunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam bidang permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, ialah dengan mendatangi langsung kantor BPKA yang berada di Kabupaten Pamekasan, kemudian peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ditemui pada saat

terdapat ketimpangan di lapangan. Dalam hal ini, peneliti mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan teknik pengumpulan data secara observasi.

Setelah melakukan teknik pengumpulan data secara observasi, maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara atas izin yang sebelumnya telah diberikan. Berbicara mengenai penggunaan teknik wawancara dalam penelitian pendekatan kualitatif, tingkat keberhasilan peneliti dalam mendapatkan data, atau informasi dari obyek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam melakukan wawancara. Dalam melakukan proses wawancaranya peneliti dituntut untuk memiliki kemampuan mendengar dengan sabar, dapat melakukan interaksi dengan narasumber, dan/atau informan secara baik, dapat mengemas pertanyaan dengan lugas sehingga dapat mudah dimengerti oleh narasumber, dan mampu mengolaborasi secara halus apa yang sedang ditanyakan jika dirasa yang diwawancarai tidak cukup memberikan informasi yang diharapkan.

Pada teknik pengumpulan data lainnya, yaitu peneliti melakukan kajian atas dokumen yang sebelumnya telah diberikan oleh narasumber pada saat proses wawancara. Dokumen yang diterima oleh peneliti saat pada proses wawancara yaitu seperti Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Peraturan Bupati No 57 tahun 2014 tentang sistem akuntansi, Peraturan Bupati No 37 tahun 2014 tentang kebijakan akuntansi yang dimana semua diterima oleh penulis diterima dalam bentuk *soft file* tersimpan dalam *flashdisk*.

3.3 Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti setelah berhasil mendapatkan data yang dibutuhkan, yaitu melakukan analisis terhadap data yang diperoleh. Data yang sudah dapat peneliti kumpulkan dalam aneka macam cara

(observasi, wawancara, dan kajian dokumen) yang dimana biasanya data-data tersebut diproses terlebih dahulu sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan sejak peneliti memulai pengumpulan data di lapangan, hingga peneliti selesai melakukan pengumpulan data, dan mendapatkan data yang sesuai.

Kemudian peneliti melakukan pengolahan data dengan memilih data-data yang pokok, memfokuskan pada data-data yang penting, sehingga dapat ditemukan alur informasi data, dan polanya. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui wawancara dengan narasumber mengenai bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah di Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian, data yang telah dipilah, dan dipilih memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Setelah itu, peneliti mencoba menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan *flowchart*, dengan menyajikan data diharapkan ini dapat memudahkan peneliti untuk dapat memahami apa yang terjadi, dan merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut karena metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Jika peneliti telah dapat melakukan penyajian data, maka dibuatlah beberapa kesimpulan yang bersifat sementara, dan mungkin kesimpulan-kesimpulan sementara tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak

awal, atau tetapi mungkin juga tidak. Kesimpulan atas hasil pengumpulan data dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian, yang telah dilaksanakan dalam bentuk pernyataan singkat, dan mudah dipahami sehingga dapat menyimpulkan bagaimana pengelolaan pendapatan asli daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.





BAB 4

Analisis Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

4.1 Analisis Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

4.1.1 Definisi Umum Pendapatan

Sebagaimana apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dikenal 2 (dua) istilah pendapatan, yakni pendapatan pada laporan operasional, dan pendapatan pada laporan realisasi anggaran. Pendapatan pada laporan operasional meliputi beberapa hak pemerintah daerah yang diakui sebagai tambahan pada ekuitas dalam periode tahun anggaran berjalan, dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan pendapatan pada laporan realisasi anggaran meliputi semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran berjalan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Secara sistem, Badan Pengelola Keuangan dan Aset menganut beberapa istilah pendapatan yang diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu: pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan berbasis akrual yang berlaku.

4.1.2 Pengakuan dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Pengaturan sistem akuntansi dalam hal pengakuan pendapatan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan

mengkategorikan pendapatan menjadi beberapa jenis pendapatan, dan bagaimana cara pengakuannya sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 57 tahun 2014. Pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan pada laporan operasional diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, atau yang dikenal dengan istilah *earned*. Serta setelah pendapatan tersebut dapat direalisasikan, dimana adanya aliran dana masuk pada sumber daya ekonomi. Selanjutnya pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan pada laporan operasional yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.

Pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan pada laporan operasional, dan sifatnya diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan atau jasa yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Hal lain, pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan pada laporan operasional diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan. Sedangkan untuk pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran, diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan.

4.1.3 Pengukuran dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten

Pamekasan

Pengukuran dalam pengelolaan pendapatan daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan terdapat, dan dilaporkan pada laporan realisasi anggaran dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan melakukan pembukuan atas penerimaan bruto pendapatan, dan tidak

mencatat jumlah nettonya atau setelah dikompensasi dengan pengeluaran. Hal ini berlaku sama dengan penerapan sistem akuntansi pada pengukuran pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan dalam laporan operasional, dilaksanakan pengukuran pula berdasarkan azas bruto, yaitu dengan cara melakukan pembukuan pada pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya atau setelah dikompensasikan dengan pengeluaran. Lain halnya dengan perhitungan besaran pengurang terhadap pendapatan dalam laporan operasional bruto maupun pendapatan dalam laporan realisasi anggaran bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud, dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Jika terdapat pengukuran atas pendapatan dalam mata uang asing maka, pendapatan tersebut diukur, dan dicatat sesuai pada tanggal transaksi dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

4.1.4 Penyajian Pendapatan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tahap selanjutnya yang dapat dilihat dari sebuah sistem akuntansi yang selama ini diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam proses pengelolaan pendapatan daerah, ialah penyajian pendapatan. Pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran disajikan dalam 3 (tiga) kelompok pendapatan yang dimana kelompok tersebut terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Sistem akuntansi yang ada pun memberlakukan untuk penyajian pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan dalam laporan operasional disajikan menurut sumber pendapatannya yang dimana meliputi pendapatan asli daerah,

pendapatan transfer, lain-lain pendapatan yang sah, serta pendapatan non operasional. Pendapatan yang terdapat, dan dilaporkan dalam laporan operasional disajikan pada mata uang rupiah. Apabila terdapat penerimaan kas atas pendapatan dalam laporan operasional dalam mata uang asing, maka pendapatan atau penerimaan tersebut dijabarkan, dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

4.1.5 Pihak-pihak yang Terkait dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Pamekasan

1. Akuntansi Pendapatan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

Penjabaran selanjutnya ketika kita membahas mengenai sistem akuntansi dalam pengelolaan pendapatan daerah, ialah terdapatnya pihak-pihak baik yang terlibat langsung, ataupun tidak. Nampak, banyak pihak yang terlibat dalam proses, namun begitu keberadaan mereka tersebut memiliki fungsi, dan tugas pokok masing-masing, serta pertanggungjawaban pula yang berbeda-beda.

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)

Pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja perangkat daerah atau yang dikenal dengan PPK – SKPD menjadi bagian tersendiri dari pihak-pihak yang terkait dalam prosedur sistem akuntansi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan. Dalam penganturannya, pejabat penatausahaan keuangan dibagi menjadi bagian verifikasi dan perbendaharaan, yang dimana mereka mempunyai fungsi untuk menerima surat pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan dari bendahara penerimaan untuk kemudian dilakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis

harian berdasarkan lampiran-lampiran yang menyertai SPJ penerimaan, seperti misalnya buku kas umum penerimaan, buku pembantu rincian obyek penerimaan, buku rekapitulasi penerimaan harian, dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Setelah melakukan verifikasi kemudian PPK yang termasuk pada bagian verifikasi dan perbendaharaan melakukan pengesahan untuk SPJ penerimaan secara administratif sebelum diserahkan kepada pengguna anggaran, serta penyerahan tersebut paling lambat diberikan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian selanjutnya yang terdapat pada PPK ialah bagian akuntansi dan pelaporan SKPD. Pejabat yang berada di bagian ini memiliki kewajiban untuk menerima surat pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan dari bendahara penerimaan untuk kemudian dilakukan pencatatan harian secara akuntansi (penjurnalan dan posting buku besar), baik untuk pendapatan dalam laporan operasional, maupun pendapatan dalam laporan realisasi anggaran atas penerimaan yang diterima oleh bendahara penerimaan berdasarkan lampiran-lampiran yang menyertai SPJ penerimaan, seperti misalnya buku kas umum penerimaan, buku pembantu rincian obyek penerimaan, dan buku rekapitulasi penerimaan harian.

b. Bendahara Penerimaan

Bendahara penerimaan menjadi fokus pejabat utama dalam prosedur sistem akuntansi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan. Bendahara penerimaan memiliki beberapa

fungsi yang menjadi kewajiban mereka dalam pihaknya yang mengelola pendapatan daerah, misalnya seperti menerima pendapatan asli daerah (PAD) untuk kemudian dicocokkan dengan surat ketetapan retribusi (SKR)/surat ketetapan pajak (SKP) daerah, dan dilanjutkan dengan pengisian surat tanda setoran (STS) secara rutin/harian. Kemudian bendahara penerimaan membuat surat tanda bukti pembayaran/bukti lain yang sah untuk diberikan kepada wajib pajak/retribusi. Bendahara penerimaan diharuskan membuat pencatatan rutin/harian atas PAD yang diterima ke dalam bentuk buku kas umum penerimaan, rekapitulasi penerimaan harian, dan buku pembantu per rincian obyek penerimaan. Menyimpan surat ketetapan retribusi (SKR)/surat ketetapan pajak (SKP) daerah, surat tanda setoran (STS), dan surat tanda bukti pembayaran sebagai dokumen penunjang pemeriksaan. Serta hal lain yang wajib dilakukan oleh bendahara penerimaan sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam prosedur sistem akuntansi pengelolaan pendapatan daerah ialah membuat SPJ penerimaan atas PAD yang diterima selama 1 (satu) bulan dilampiri dengan buku kas umum penerimaan, buku rekapitulasi penerimaan, dan buku pembantu rincian obyek penerimaan yang kemudian dilaporkan kepada pengguna anggaran melalui bagian verifikasi PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

c. Bendahara Penerimaan Pembantu

Pejabat lain yang ikut berperan serta pada prosedur sistem akuntansi pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan

yaitu bendahara penerimaan pembantu. Orang-orang yang mendapat kepercayaan pada bagian ini, memiliki kewajiban sebagai perwakilan bendahara penerimaan ditingkat unit kerja. Bendahara penerimaan pembantu bertugas untuk menerima PAD di tingkat unit kerja, dimana mereka juga diwajibkan membuat pencatatan penerimaan rutin yang diterima oleh unit kerja ke dalam bentuk buku kas penerimaan harian pembantu, buku pembantu per rincian obyek penerimaan, dan rekapitulasi penerimaan harian pembantu, serta kemudian membuat SPJ penerimaan pembantu untuk dilaporkan ke bendahara penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

d. Pengguna Anggaran

Pengguna anggaran menjadi pihak pendukung yang terdapat pada prosedur sistem akuntansi yang dalam hal ini pengguna anggaran mempunyai wewenang untuk mengotorisasi surat pertanggungjawaban (SPJ) penerimaan yang telah diverifikasi secara administratif oleh bagian verifikasi, dan perbendaharaan PPK-SKPD, untuk kemudian diberikan kepada bendahara umum daerah (BUD).

e. Bank/Kas Daerah (Kasda)

Pihak lainnya yang terkait dalam prosedur sistem akuntansi pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan, yaitu Bank/kas daerah. Bank/kas daerah bertugas untuk menerima penyetoran pembayaran berdasarkan surat tanda setoran (STS) dari bendahara penerimaan atau wajib pajak, untuk kemudian dibuatkan nota kredit berdasarkan jumlah setoran yang tertera pada surat tanda setoran (STS). Setelah itu

dilakukan otorisasi. Selanjutnya Bank/kas daerah (Kasda) kemudian menyerahkan surat tanda setoran (STS), dan nota kredit kepada bendahara umum daerah (BUD) untuk kemudian digunakan sebagai dokumen penunjang proses verifikasi fungsional.

f. Bendahara Umum Daerah (BUD)

Bendahara umum daerah (BUD) tidak dapat terpisahkan dari pihak-pihak yang terlibat dalam prosedur sistem akuntansi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan. Bendahara umum daerah menjadi pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis terhadap SPJ penerimaan yang diterimanya dari pengguna anggaran. Dalam hal ini, verifikasi yang dilakukan bersifat fungsional karena hal ini terkait dengan rekonsiliasi penerimaan. Selanjutnya bendahara umum daerah (BUD), menyimpan salinan SPJ penerimaan sebagai dokumen/arsip.

2. Akuntansi Pendapatan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan selama ini memiliki 2 (dua) fungsi dalam masa kerjanya, yaitu sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta berfungsi pula sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD). Berikut beberapa pihak yang terkait dalam sistem akuntansi dalam pengelolaan pendapatan dari sudut pandang Badan Pengelola Keuangan dan Aset sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

a. Bendahara (PPKD)

Bendahara PPKD memiliki beberapa langkah yang harus dilakukan dalam hal keterkaitannya dengan prosedur sistem akuntansi

pendapatan PPKD. Beberapa langkah yang harus dilakukan tersebut, ialah mencatat dan membukukan semua penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan. Selanjutnya membuat rekap penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan. Serta melakukan penyetoran uang yang diterima ke kas daerah setiap hari

b. Fungsi Akuntansi PPKD

Sama halnya dengan pihak-pihak terkait lainnya, fungsi akuntansi dari PPKD juga memiliki keharusan yang dilakukan dalam prosedur sistem akuntansi pendapatan PPKD. Seperti melakukan pencatat transaksi atau kejadian pendapatan pada laporan operasional, dan pendapatan pada laporan realisasi anggaran yang berdasarkan pada bukti bukti transaksi yang sah dan valid ke buku jurnal laporan realisasi anggaran, buku jurnal laporan operasional, serta neraca. Prosedur lainnya melakukan posting jurnal-jurnal transaksi atau kejadian pendapatan pada laporan operasional, dan pendapatan pada laporan realisasi anggaran kedalam buku besar masing-masing rekening (rincian objek). Selanjutnya, menyusun laporan keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP.SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

c. PPKD selaku BUD

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam hal ini sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, memiliki tugas

fungsional sebagai bendahara umum daerah. Beliau mempunyai keharusan untuk penandatanganan atau pengesahan dokumen atas surat ketetapan pajak atau retribusi daerah. Serta melakukan penandatanganan atas laporan keuangan yang telah disusun oleh fungsi akuntansi PPKD.

4.1.6 Deskripsi Prosedur Sistem Akuntansi dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Pendapatan asli daerah seperti apa yang telah dijelaskan diawal berasal dari 3 (tiga) sumber, yaitu pendapatan asli daerah (pendapatan pajak, retribusi daerah, dan hasil eksekusi jaminan), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah (pendapatan hibah, dan pendapatan non-operasional).

1. Pendapatan Pajak

Pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana urutan prosedur yang harus dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan (PPK-SKPD) dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan. Transaksi pendapatan satuan kerja perangkat daerah merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan pada peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD) yang dimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset bergerak sebagai SKPD, maka transaksi atas pajak daerah tersebut dianggarkan, dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya apabila Badan Pengelola Keuangan dan Aset bergerak sebagai PPKD, maka pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) selaku BUD,

dan transaksi atas pendapatan pajak daerah dianggarkan, dan dicatat oleh PPKD. (Lampiran 1)

Berikut ialah jurnal akuntansi yang harus dibuatkan berdasar pada surat ketetapan pajak daerah, dimana fungsi akuntansi akan mengakui penerimaan pendapatan pada laporan operasional, dan mencatatnya di dalam jurnal pendapatan untuk laporan operasional.

Piutang Pajak daerah	Xxx
Pendapatan Pajak Daerah ...-LO	xxx

Pihak SKPD yang berwenang, akan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKP Daerah) terkait. Selain disampaikan kepada wajib pajak (WP), SKP Daerah tersebut akan disampaikan pula kepada PPK-SKPD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset. SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam mengakui pendapatan pajak daerah. Selanjutnya bendahara penerimaan akan menerima pembayaran pajak daerah dari wajib pajak daerah. Penerimaan kas atas pendapatan pajak tersebut akan dibandingkan dengan SKP daerah. Apabila telah sesuai, maka bendahara penerimaan akan membuat tanda bukti pembayaran yang diserahkan kepada wajib pajak daerah, dan mencatat penerimaan kas atas pendapatan pajak ke dalam buku kas umum penerimaan sisi penerimaan. Terhadap transaksi atas penerimaan kas tersebut fungsi akuntansi SKPD mengakui pelunasan piutang atas pendapatan pajak dengan mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Piutang Pajak Daerah (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal sebagai berikut:

Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx
Piutang Pajak Daerah	xxx

Sebagai transaksi atas pendapatan pajak pada laporan realisasi anggaran, maka fungsi akuntansi SKPD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit, dan “Pendapatan Pajak Daerah - LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	Xxx
Pendapatan Pajak Daerah ...-LRA	xxx

Pendapatan pajak yang diterima tersebut, bendahara penerimaan akan melakukan penyetoran ke kas daerah dengan menggunakan surat tanda setoran (STS), dan mencatat penyetoran kas atas pendapatan pajak tersebut ke dalam buku kas umum penerimaan di sisi pengeluaran. Berdasarkan surat tanda setoran tersebut, fungsi akuntansi SKPD mencatat “RK PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

RK PPKD	Xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx

2. Retribusi Daerah

Prosedur lain yang diterapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset dalam sistem akuntansi pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Pamekasan, yaitu prosedur atas pencatatan retribusi daerah. Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kepada bank kas daerah, kemudian akan wajib retribusi menerima surat ketetapan retribusi daerah

(SKR). Bendahara penerimaan, melakukan pencatatan atas penerimaan retribusi ke dalam buku kas umum penerimaan di sisi penerimaan. (Lampiran 2). Surat ketetapan retribusi juga akan menjadi dasar bagi fungsi akuntansi SKPD untuk mengakui pendapatan dengan mencatat “Piutang Retribusi Daerah” di debit dan “Pendapatan Retribusi Daerah - LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Retribusi Daerah	Xxx
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	xxx

Selanjutnya pencatatan atas transaksi pendapatan retribusi daerah pada laporan realisasi anggaran, fungsi akuntansi SKPD akan melakukan pencatatan “Estimasi Perubahan SAL” di debit, dan “Pendapatan Retribusi Daerah - LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	Xxx
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	xxx

Atas pendapatan retribusi yang diterima tersebut, bendahara penerimaan akan melakukan penyetoran ke kas daerah dengan menggunakan surat tanda setoran (STS), dan melakukan pencatatan atas penyetoran kas ke dalam buku kas umum penerimaan di sisi pengeluaran. Berdasarkan surat tanda setoran tersebut, fungsi akuntansi - SKPD mencatat “RK PPKD” di debit, dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

RK PPKD	Xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	Xxx

Pada setiap akhir tahun terdapat pengakuan terhadap surat ketetapan retribusi yang belum dilunasi, yang dimana fungsi akuntansi - SKPD melakukan pencatatan “Piutang Retribusi Daerah (sesuai rincian objek terkait)” di debit dan “Pendapatan Retribusi Daerah – LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Retribusi Daerah	Xxx
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	xxx

3. Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dari hasil eksekusi jaminan, ialah berupa segala biaya yang dikeluarkan, dan bersangkutan-pautan langsung dengan hal perizinan, jika dirasa pembuat izin tidak melakukan kewajibannya setelah surat perizinan tersebut dibuat atau dikeluarkan oleh SKPD berwenang. Dalam prosedurnya, sistem akuntansi mengatur bahwa pihak ketiga yang dalam hal ini pembuat izin melakukan pembayaran uang jaminan, bersamaan dengan pembayaran perizinan, misal perizinan pemasangan iklan. Kemudian pembuat izin tersebut akan menerima tanda bukti pembayaran (TBP). (Lampiran 3). Tanda bukti pembayaran juga menjadi dasar bagi fungsi akuntansi - PPKD untuk mengakui utang jaminan dengan melakukan pencatatan “Kas di Kas Daerah” di debit, dan “Utang Jaminan” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah

Xxx

Utang Jaminan

xxx

Pada saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya setelah izin dibuat, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset selaku PPKD akan melakukan eksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan sebagai utang jaminan. Fungsi akuntansi - PPKD akan membuat bukti memorial terkait dengan eksekusi uang jaminan tersebut untuk diotorisasi oleh PPKD. Sehingga berdasarkan bukti memorial tersebut, fungsi akuntansi - PPKD melakukan pencatatan dengan “Utang Jaminan” di debit, dan “Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan - LO” di kredit dengan jurnal:

Utang Jaminan

Xxx

Pendapatan Hasil Eksekusi atas
Jaminan – LO

xxx

Sebagai hasil transaksi yang terjadi tersebut, jika dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran, maka fungsi akuntansi - PPKD melakukan pencatatan dengan “Estimasi Perubahan SAL” di debit, dan “Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan - LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL

Xxx

Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan – LRA

xxx

4. Pendapatan Transfer

Prosedur atas pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah, dianggarkan berdasarkan dokumen resmi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah provinsi. Namun demikian,

penetapan atas pendapatan transfer tersebut belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan pada laporan operasional. Hal ini dikarenakan mengingat kepastian pendapatan tergantung pada persyaratan-persyaratan yang diatur untuk penyaluran alokasi tersebut. Pada prosedurnya, pengakuan atas pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah. (Lampiran 5). Dalam kasus ini, bagian fungsi akuntansi - PPKD akan melakukan pencatatan dengan “Kas di Kas Daerah” di debit, dan “Pendapatan Transfer - LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	Xxx
Pendapatan Transfer – LO	xxx

Walaupun demikian, pendapatan transfer dapat diakui pada saat terbitnya dokumen resmi mengenai penetapan alokasi, jika dalam kasus ini terkait dengan kurang salur sebagai dasar pencatatan pengakuan pendapatan tersebut. Bagian fungsi akuntansi - PPKD akan melakukan pencatatan dengan “Piutang Pendapatan” di debit, dan “Pendapatan Transfer - LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Piutang Pendapatan	Xxx
Pendapatan Transfer – LO	xxx

Apabila pemerintah daerah telah menerima dana transfer dari pemerintah pusat, dan/atau pemerintah provinsi atas kurang salur tersebut, maka bagian rekening kas umum daerah akan mengeluarkan nota kredit untuk PPKD. Berdasarkan nota kredit tersebut, bagian fungsi akuntansi - PPKD akan melakukan pencatatan dengan “Kas di Kas Daerah” di debit, dan

“Piutang Pendapatan Transfer (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah	Xxx
Piutang Pendapatan Transfer	xxx

Hal lain jika pendapatan transfer dilaporkan sebagai transaksi pada laporan realisasi anggaran terhadap realisasi pendapatan transfer. Bagian fungsi akuntansi – PPKD akan melakukan pencatatan dengan “Estimasi Perubahan SAL” di debit, dan “Pendapatan Transfer-LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL	Xxx
Pendapatan Transfer – LRA	xxx

5. Pendapatan Hibah

Sistem akuntansi yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan memiliki prosedur pengakuan jika terdapat transaksi atas pendapatan hibah yang terjadi. Surat perjanjian hibah yang telah ditandatangani belum dapat dijadikan dasar pengakuan pendapatan pada laporan operasional, mengapa demikian ? mengingat bahwa adanya proses, dan persyaratan untuk realisasi pendapatan hibah tersebut. Demikian dengan bagian fungsi akuntansi – PPKD melakukan pengakuan atas pendapatan hibah dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada RKUD dengan mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit, dan “Pendapatan Hibah - LO” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah

Xxx

Pendapatan Hibah – LO

xxx

Selain itu, dikarenakan hibah yang diterima berupa sejumlah uang, dan dalam hal ini terdapat kaitannya dengan realisasi anggaran, maka bagian fungsi akuntansi - PPKD melakukan pencatatan dengan “Estimasi Perubahan SAL” di debit, dan “Pendapatan Hibah - LRA” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL

Xxx

Pendapatan Hibah – LRA

xxx

Selanjutnya khusus untuk perjanjian hibah dalam bentuk suatu barang yang berupa aset tetap, maka bagian fungsi akuntansi - PPKD melakukan pencatatan dengan “Aset Tetap” di debit, dan “Pendapatan Hibah - LO” di kredit dengan jurnal:

Aset Tetap

Xxx

Pendapatan Hibah – LO

xxx

4.2 Analisis Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan

Berikut ini penjabaran bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam melaksanakan langkah-langkah yang menjadi acuan terlaksananya prinsip-prinsip *good governance*, hingga hasil yang diperoleh dari sisi pendapatan daerah.

4.2.1 Implementasi Prinsip Efektifitas dan Efisiensi sebagai salah satu Penilaian *Good Governance*

Pengelolaan layanan administrasi secara efektif dan efisien, berbasis budaya pemerintah yang bersih, akuntabel transparan, dan bebas dapat diwujudkan dengan mengambil beberapa arah kebijakan, seperti peningkatan kualitas, dan manajerial layanan administratif kepada SKPD (satuan kerja pemerintah daerah) terkait. Pencapai keberhasilan tersebut, dapat ditetapkan dengan beberapa program seperti misalnya program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, program peningkatan profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan, serta program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

Berikut beberapa capaian indikator kinerja tahun 2016 yang dapat dilihat dengan melakukan perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing kegiatan dengan rencana tingkat capaian (target) dari masing-masing sasaran. Adapun analisis capaian kinerja dari masing-masing kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran 1
Terciptanya Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator sasaran, yang capaian kinerjanya 88,79 %. Oleh sebab itu capaian kinerja menunjukkan predikat Sangat Berhasil. Dan strategi yang digunakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi 17 (tujuh belas) kegiatan. Beberapa contoh kegiatan tersebut diantaranya, penyusunan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi

keuangan daerah, asistensi pengelolaan keuangan pada SKPD, pemeliharaan dan pengembangan SIM gaji, dan pendukung pengelolaan pelayanan gaji pegawai. Kemudian untuk mencapai kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 4.433.372.400 dan telah terealisasi sebesar Rp 3.936.290.000 atau 88,79 %. (LAKIP, 2016)

Selanjutnya dapat dijabarkan dalam tabel berikut :

Sasaran 2
Terciptanya Peningkatan Kualitas Sistem dan Sarana Pengamanan Asset Daerah

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator sasaran, yang capaian kinerjanya 96,50 %. Oleh sebab itu capaian kinerja menunjukkan predikat Sangat Berhasil. Dan strategi yang digunakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan antara lain. Beberapa contoh kegiatan tersebut diantaranya, penyusunan standart satuan harga tahun anggaran 2016, pembuatan dan pemasangan papan nama, dan penghapusan asset inventaris barang daerah. Kemudian untuk mencapai kegiatan ini dibutuhkan anggaran sebesar Rp 625.400.000 dan telah terealisasi sebesar Rp 603.486.315 atau 96,50 %.

Sasaran 3
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan

Sasaran ini mempunyai 1 (satu) indikator sasaran, yang capaian kinerjanya 90,57 %. Oleh sebab itu capaian kinerja menunjukkan predikat Sangat Berhasil. Dan strategi yang digunakan melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dijabarkan menjadi 4 (empat) kegiatan, Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur yang dijabarkan menjadi 9 (sembilan) kegiatan dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dijabarkan menjadi 1 (satu) kegiatan. Penjabaran tersebut di atas menggambarkan bahwa kinerja selama tahun 2016 telah mampu mencapai tingkatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pengelolaan anggaran untuk kegiatan-kegiatan pendorong kinerja di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. (Lampiran 6)

Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam pengamplikasian prinsip efektivitas dan efisiensi dengan fokus pengelolaan pendapatan asli daerah.

a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

1. Intensifikasi Pendapatan Daerah

Peningkatan Pendapatan Daerah yang dihimpun dari Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dapat dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan. Intensifikasi dilakukan dengan mengoptimalkan jenis penerimaan yang ada baik itu pajak daerah, retribusi daerah maupun Pendapatan Asli Daerah yang lain, baik peningkatan tarif maupun penambahan wajib pajak/wajib kelembagaan, ketatalaksanaan dan kemampuan personil.

2. Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Begitu juga dengan ekstensifikasi dapat dilakukan dengan menambah jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang baru melalui Peraturan Daerah yang sebelumnya belum ada dalam jenis pendapatan

tersebut. Namun perlu diingat bahwa dalam upaya ini, khususnya penggalan sumber dari pajak daerah dan retribusi daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yakni bahwa pungutan pajak dan retribusi daerah dilaksanakan sesuai dengan UU nomor 28 Tahun 2009 serta tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah sebagai sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga harus melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak membebani masyarakat.

b. Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat

Dalam menerapkan strategi peningkatan pengelolaan keuangan dan aset, dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, maka dibuatlah beberapa arah kebijakan yang dapat diambil dalam mewujudkan strategi tersebut, seperti peningkatan transparansi pelaksanaan penganggaran. Arah kebijakan tersebut telah dapat dicapai, jika memenuhi beberapa indikator seperti hasil opini audit BPK, jumlah alokasi dana desa yang disalurkan, jumlah bantuan keuangan untuk kelurahan atau desa yang disalurkan, dan bagaimana jumlah kekayaan badan kredit desa

Sehingga ditetapkan pula beberapa program untuk mencapai indikator yang telah disebutkan di awal, yakni program pembinaan, dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa. Kebijakan lain yang diterapkan dalam mencapai peningkatan pengelolaan keuangan dan aset, dengan mengedepankan kebutuhan masyarakat, ialah dengan melakukan peningkatan pada kompetensi pengawasan. Maka program yang perlu dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut, ditetapkan

program peningkatan sistem pengawasan internal, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan.

4.2.5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Adapun hasil target dan realisasi Pendapatan Daerah yang diliputi dari rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Pada laporan realisasi anggaran yang terlampir tersebut nampak bagaimana presentase daripada apa yang telah terealisasi terhadap target anggaran. Pertanyaan kemudian muncul, apakah ketika realisasi yang ada telah melebihi target dapat dikatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tersebut sudah mampu mengimplementasikan prinsip efektifitas dan efisiensi ?. Hal ini kembali pada bagaimana proses nyata yang terjadi di lapangan. Jika dilihat apa yang dilaporkan sesuai dengan kondisi nyata yang terdapat di daerah, dan/atau wilayah Kabupaten Pamekasan, maka target dan realisasi atas pendapatan daerah dapat menggambarkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan telah mampu mengimplementasikan prinsip efektifitas dan efisiensi sebagai salah penilaian *good governance*.

4.3 Implementasi Prinsip Akuntabilitas sebagai salah satu penilaian *Good*

Governance

Sedikit mengulas kembali bagaimana pelaksanaan prinsip akuntabilitas sebagai salah satu penilaian terciptanya *good governance*. Bahwa dalam hal ini, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan memberikan pengertian bahwa prinsip akuntabilitas diandaikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas

pencapaian tujuan, dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun anggaran. Implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah ini diharapkan bisa mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada uang (*input oriented*) menjadi orientasi pada hasil (*result oriented*), serta dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan selama tahun anggaran 2016 maka disusunlah laporan kinerja tahunan, dan/atau laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas capaian program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun serta sebagai upaya melaksanakan prinsip transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintahan yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan wujud tanggung jawab ini maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes.

Di sisi yang lain, laporan tersebut pula disusun dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya manusia aparatur, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran kepada Bupati Pamekasan.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) dapat diketahui bagaimana tingkat efektivitas, dan efesiensi atas kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan melalui pelaksanaan Program dan kegiatan dengan mendasarkan pada rencana kerja tahunan dan rencana stratejik yang telah ditetapkan. Penyajian laporan hasil pelaksanaan kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 diharapkan menjadi cermin bagi kita semua untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar pelaksanaan kinerja ke depan dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien.

4.3.1 Akuntabilitas dalam Pengukuran Kinerja

Metode yang dapat digunakan untuk melihat bagaimana implementasi prinsip akuntabilitas telah terlaksana dalam kinerja instansi, yaitu dengan cara mengukur capaian indikator kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tahun 2016, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \text{Realisasi} / \text{Target} \times 100 \%$$

Mengapa capaian indikator kinerja dapat menjadi gambaran bagaimana akuntabilitas dalam kinerja instansi ?. Hal ini dapat dijelaskan bahwa dengan penggunaan rumus capaian indikator kinerja dalam penilaian akuntanbilitas,

sebagai pengguna laporan dapat melihat bagaimana besaran anggaran yang telah terealisasi terhadap target anggaran yang telah ditentukan di awal.

4.3.2 Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas anggaran menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban mengenai bagaimana integritas keuangan, ketaatan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban yang dapat dilihat dari laporan keuangan yang berlaku, meliputi penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran baik secara pendapatan, ataupun belanja SKPD. Sedangkan instrument utama akuntabilitas keuangan dalam pengelola keuangan dan aset daerah ialah anggaran pemerintah dan data laporan tahunan yang disusun secara periodik sehingga nampak apa yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dalam proses penganggaran, secara keseluruhan menjadi relevan untuk dipertanggungjawabkan, dan pengendaliannya pada berbagai tingkatan operasi dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahun anggaran 2015.

4.4 Implementasi Prinsip Transparansi sebagai salah satu penilaian

Good Governance

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat daerah, transparansi sangat penting untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah. Transparansi atas laporan keuangan, ataupun pengelolaan pendapatan daerah disajikan secara terbuka, dan keterbukaan mengenai segala informasi yang menyangkut program, dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Begitu pula dalam pengelolaan pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan tahun anggaran 2016, transparansi sangat dibutuhkan sebagai bagian dalam pelaksanaan *good*

governance. Seiring dengan kemajuan teknologi, transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah dapat disajikan melalui *e-government*.

E-government menjadi ciri oleh instansi pemerintah dalam penggunaan teknologi informasi. Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan penyebaran informasi secara online yang dapat diakses oleh masyarakat melalui <http://bpka-pamekasan.net/>. Dalam website tersebut tersedia segala macam informasi mengenai bagaimana Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan melaporkan kebijakan, aturan, dan kegiatan yang telah terjadi selama tahun anggaran berjalan. Adanya website tersebut diharapkan dapat menjadi sarana bagi masyarakat dalam mengakses informasi yang bersangkutan dengan pengelolaan keuangan, khususnya dalam bidang pendapatan daerah. Hal tersebut dapat dilihat gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Website BPKA



Menurut kepala bidang akuntansi yang ditemui pada saat proses penelitian, dijelaskan bahwa keterbukaan, atau transparansi yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan sesuai dengan aturan. Website yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan selalu update dalam memberikan informasi-informasi terkini. Terjabar jelas bagaimana bentuk pengelolaan yang terjadi sehingga masyarakat dapat dengan aktif, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan di Kabupaten Pamekasan. Bapak Sahrul Munir, S.Sos, MM pula menjabarkan bahwa walaupun Badan Pengelola Keuangan dan Aset menerapkan prinsip transparansi, dan/atau keterbukaan tetap masih ada beberapa informasi yang tidak di publis ke publik. Mengapa demikian ? hal ini disebabkan karena ada beberapa informasi yang sifatnya tidak untuk di publis guna menghindari penyelewengan atas penggunaan informasi oleh oknum-oknum. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip transparansi, dan/atau keterbukaan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset memiliki keterbatasan.

4.5 Permasalahan pada Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Bagian ini diungkap permasalahan yang dapat diidentifikasi dari hasil penelitian di lapangan. Permasalahan tersebut menjadikan peluang terjadinya kecurangan, dan/atau penyimpangan yang terjadi di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan, yaitu mengenai target anggaran pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah di Kabupaten Pamekasan tidak mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini terlihat dalam profil anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2016, yang dimana ini menjadi rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas, dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalam segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 9 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 dan dijabarka dengan Peraturan Bupati Nomor : 36 Tahun 2015 Tanggal 30 Desember 2015. Berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD tersebut ditetapkan bahwa APBD Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 1.846.498.441.610,93.

Pendapatan ini direncanakan diperoleh dari: a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 142.771.055.750,93 (7,73 persen), b. Dana Perimbangan sebesar Rp 1.392.252.062.060,00 (75,40 persen) dan c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 311.475.323.800,00 (16,87 persen) dengan jumlah APBD sebesar Rp 1.846.498.441.610,93. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan sebesar Rp 142.771.055.750,93 terdiri dari, hasil pajak daerah sebesar Rp 19.181.652.096,00, hasil retribusi daerah sebesar Rp 12.232.949.328,00, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 1.847.294.966,08, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 109.509.159.360,85.

Berdasarkan target APBD yang telah disepakati antara pemerintah dan DPRD Pamekasan nilai PAD Pamekasan memang sangat kecil hanya 7,73 persen

dari total APBD Pamekasan. Artinya seandainya Pamekasan ini hanya dibiayai dengan dana pendapatan asli daerah saja maka pemerintahan Pamekasan ini tidak bisa berjalan. Pertanyaannya adalah ada apa dengan PAD Pamekasan ? apa yang salah dengan PAD Pamekasan ? apa betul PAD terjadi kebocoran ? atau memang target PAD yang terlalu kecil ?. Beberapa pertanyaan diatas perlu solusi yang konstruktif agar peningkatan PAD Pamekasan membuahkan hasil kepada peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Kondisinya target PAD Pamekasan 2016 yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPRD memang sangat kecil, sehingga hal ini tidak membuat SKPD yang terkait dengan peningkatan PAD tidak mempunyai usaha yang lebih, karena dengan usaha sedikit target PAD sudah tercapai. Oleh karena itu, akan lebih baik jika peningkatan PAD tidak sepenuhnya mengacu pada target yang ditetapkan.

Potensi peningkatan dari pajak dan retribusi memiliki peluang sangat besar, diantaranya tingkat hunian hotel, restoran, dan berkembang pesatnya developer perumahan, dimana ini akan menjadi kontribusi penambahan PAD yang besar, namun geliat ekonomi ini nampaknya tidak berpengaruh signifikan kepada peningkatan PAD karena target yang kecil, dan terdapat kecenderungan “pengaturan sesuai target”, yang dalam kondisinya target dari pada PAD sangat kecil. Selanjutnya bagaimana dengan penerapan perda pengunjung hotel dan restoran yang dikenai pajak daerah sebesar 10 persen dari tarif hotel, dan restoran ?. Apakah pamekasan telah memiliki kebijakan yang tersistem ?. Kondisinya memang hal tersebut, tidak berjalan, hal ini dikarenakan Pamekasan tidak terdapat kebijakan yang tersistem untuk hal penerapan perda pengunjung hotel, dan restoran yang dikenai pajak daerah sebesar 10 persen dari tariff hotel, dan

restoran. Sehingga pengusaha hotel, dan restoran hanya memberikan pajak tetap yang diperkirakan sendiri, dan cenderung dibuat rendah.

Seharusnya sistem ini perlu dibangun dengan memanfaatkan teknologi komputer, sebagai contoh apa yang telah diterapkan di Surabaya. Dikutip dari *IDN Times*, Pemerintah Kota Surabaya melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pajak Daerah mengeluarkan inovasi untuk meningkatkan capaian pajak daerah tahun depan. Upaya ini ditujukan untuk wajib pajak daerah di sektor hiburan, restoran, hotel, dan parkir. "Kami membuat aplikasi supaya sistem pembayaran pajak resto, hotel, parkir, dan hiburan bisa terkoneksi secara real time dengan sistem kami," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD), Yusron Sumartono. Sistem seperti ini yang perlu dibangun di Pamekasan, agar pengusaha hotel, dan restoran tidak sewenang-wenang memberikan pajak tetap atas ketetapan sendiri.

Hal lain yaitu sistem pengawasan kepada sumber daya manusia yang mengurus PAD ini agar tidak mengalami "kebocoran". Pengawasan ini meliputi semua sektor sehingga sumber daya manusia yang ada di SKPD terkait bekerja maksimal dengan sistem reward, dan punishment. Guna mengukur kinerja apakah terjadi "kebocoran" atau tidak yaitu dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realitas penerimaan. Secara hitungan, jika tidak sesuai target maka perlu dipertanyakan, apakah pegawai yang tidak bekerja maksimal atau memang terjadi "kebocoran". Masalah juga bisa terjadi sebenarnya, apabila potensi yang terdapat di Pamekasan sangat besar, tetapi target yang ditetapkan sengaja dibuat rendah, ini juga bisa berarti "kebocoran". sehingga perlu dibangun

sumber daya manusia yang mandiri, kreatif, dan inovatif untuk terus
meningkatkan PAD Pamekasan.





Bab 5

Penutup

5.1 Kesimpulan

Pada bagian ini penulis mencoba untuk membuat sebuah kesimpulan dari pada apa yang telah dilakukan sebelumnya atas penelitian yang terjadi di lapangan. Dalam hal lain penjabaran kesimpulan ini juga menjadi sebuah jawaban dari permasalahan yang diangkat dalam skripsi. Dari uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini, maka ditarik sebuah kesimpulan yaitu implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan asli daerah tahun anggaran 2016, khususnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tidak terlaksana secara maksimal dengan 3 sudut pandang prinsip, prinsip efektivitas dan efisiensi, prinsip akuntabilitas, dan prinsip transparansi. Hal ini didasarkan karena masih terdapat beberapa permasalahan yang telah diungkap pada bab 4 (empat), dimana menurut peneliti permasalahan-permasalahan tersebut dapat menjadi sangat urgen apabila tidak diperhatikan secara seksama.

Seperti kondisi target PAD Pamekasan 2016 yang telah disepakati antara Pemerintah, dan DPRD yang sangat kecil, sehingga hal ini tidak membuat SKPD yang terkait dengan peningkatan PAD tidak mempunyai usaha yang lebih, karena mereka menganggap dengan usaha sedikit target PAD sudah tercapai. Selanjutnya kondisi sistem penerapan perda atas pengunjung hotel, dan restoran yang dikenai pajak daerah, tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan Pamekasan tidak terdapat kebijakan yang tersistem untuk hal penerapan perda

pengunjung hotel, dan restoran yang dikenai pajak daerah sebesar 10 persen dari tarif hotel, dan restoran. Sehingga pengusaha hotel, dan restoran hanya



memberikan pajak tetap yang diperkirakan sendiri, dan cenderung dibuat rendah. Hal lain yaitu sistem pengawasan kepada sumber daya manusia yang mengurus PAD ini agar tidak mengalami “kebocoran”. Pengawasan ini meliputi semua sektor sehingga sumber daya manusia yang ada di SKPD terkait bekerja maksimal dengan sistem reward, dan punishment. Guna mengukur kinerja apakah terjadi “kebocoran” atau tidak yaitu dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dengan realitas penerimaan.

Walaupun nampak dalam penjabaran dari segi kebijakan, atau sistem, atau prosedur, serta bagaimana hasil interpretasi atas anggaran terlihat bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan telah mampu untuk mengimplimentasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pendatan daerah secara maksimal. Namun menurut penulis, hal ini tidak bersesuaian dengan bagaimana kondisi secara nyata di Kabupaten Pamekasan. Keadaan, dan/atau kondisi wilayah yang menurut penulis, dari waktu ke waktu tidak nampak perubahan yang signifikan atas pengelolaan pendapatan yang selama ini telah dilaporkan. Sehingga ini menjadi dasar mengapa penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan belum mampu untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan pendapatan daerah secara maksimal.

5.2 Kritik / Saran

Sehubungan dengan apa yang telah dijabarkan pada sub judul sebelumnya mengenai kesimpulan atas akhir sebuah penelitian, maka pada bagian ini akan dijabarkan beberapa kritik, dan/atau saran yang dapat penulis berikan atas

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa kritik, dan/atau saran tersebut, ialah;

1. Sebaiknya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan tersebut melalui upaya-upaya peningkatan pelayanan, pengawasan internal, perbaikan sistem dan prosedur yang telah ada pada pengelolaan pendapatan daerah. Kritik, dan/atau saran tersebut diharapkan dapat mampu menyelesaikan permasalahan atas sistem informasi akuntansi, dimana dalam hal ini keefesiensian dan keefektifan sebuah sistem tergambar secara utuh pada prosedur pengelolaan pendapatan asli daerah. Sesuai dengan dasar hal tersebut berpengaruh terhadap kompetensi sumber daya manusia serta operasionalisasi.
2. Mengelola potensi semaksimal mungkin dengan cara mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada. Penulis membaca peluang, bahwa pamekasan memiliki potensi atas sumber pendapatan daerah yang dalam hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan. Seperti dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, pendidikan penjenjangan, diklat teknis fungsional maupun pendidikan formal agar menjadi profesional, berdaya guna, dan berhasil guna. Para pegawai diharapkan untuk mampu mengikuti diklat-diklat, dan/atau pelatihan mengenai pengelolaan keuangan daerah. Karena dengan begitu diharapkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan dapat mengurangi

sisi kebiasaan buruk daripada sumber daya manusia sebagai aparatur negara. Jika hal ini dibandingkan dengan sistem kerja yang cangkupan wilayahnya sudah lebih modern, seperti Kota Surabaya.

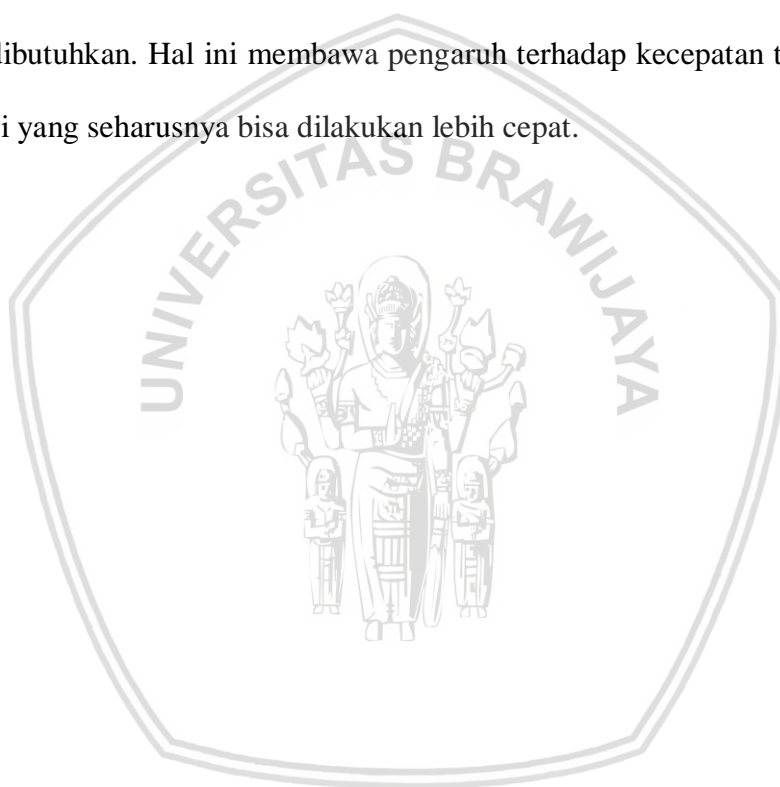
4. Pembenahan terhadap sarana dan prasarana pendukung pada umumnya, dan tempat dan/atau ruang kerja pada khususnya. Nampak terlihat pada saat penulis melakukan penelitian, ruang kantor untuk sebidang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan tidaklah kurang dari kata nyaman. Kondisi ruang kantor yang kecil, pengarsipan data yang kurang teratur di setiap bagian ruangan, membuat keadaan dalam ruang kantor tersebut menjadi kurang nyaman. Menurut penulis, faktor ketidaknyaman tersebut dapat membuat sebuah permasalahan-permasalahan yang mampu mempengaruhi bagaimana implementasi *good governance* dalam pengelolaan pendapatan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Berbicara mengenai keterbatasan terhadap penelitian ini, penulis dapat mengungkapkan beberapa hal yang menjadi keterbatasan atas penelitian ini. Keterbatasan tersebut merupakan sebab akibat yang muncul pada saat proses penelitian terjadi. Seperti pada informan, dan/atau narasumber yang segan untuk memaparkan secara jelas tentang bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi di dalam instansi tersebut. Sehingga kita sebagai pewawancara harus dengan teliti, dan seksama memaknai akan jawaban daripada informan, dan/atau narasumber tersebut. Selanjutnya tuntutan waktu menjadi hal yang sangat krusial, hal ini dikarenakan informan, dan/atau narasumber tidak memiliki waktu luang yang banyak untuk kita dapat menggali informasi yang lebih mendalam. Ketepatan

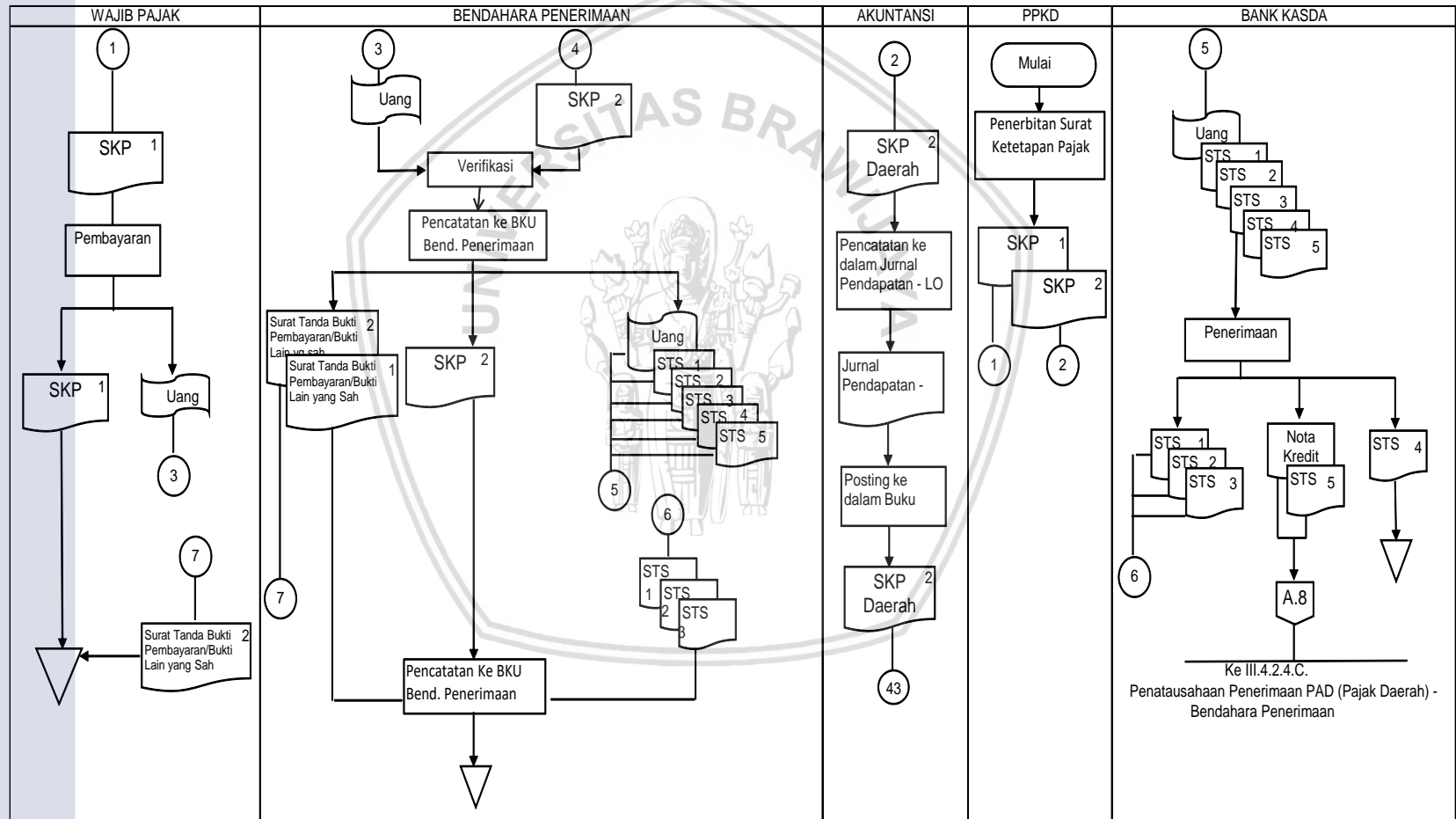
pada waktu penelitian ini, dilakukan bersamaan dengan dilakukannya proses audit di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Pamekasan.

Keterbatasan lain yang dapat ditemui pada saat penelitian berlangsung, yaitu kesabaran peneliti dalam menghadapi sikap-sikap daripada para pegawai yang berada dalam instansi tersebut. Peneliti dalam hal ini orang yang memerlukan informasi dianggap kurang memberikan keuntungan kepada instansi terkait, sehingga pegawai-pegawai yang berada di dalam instansi tersebut merasa dirinya dibutuhkan. Hal ini membawa pengaruh terhadap kecepatan tersampainya informasi yang seharusnya bisa dilakukan lebih cepat.

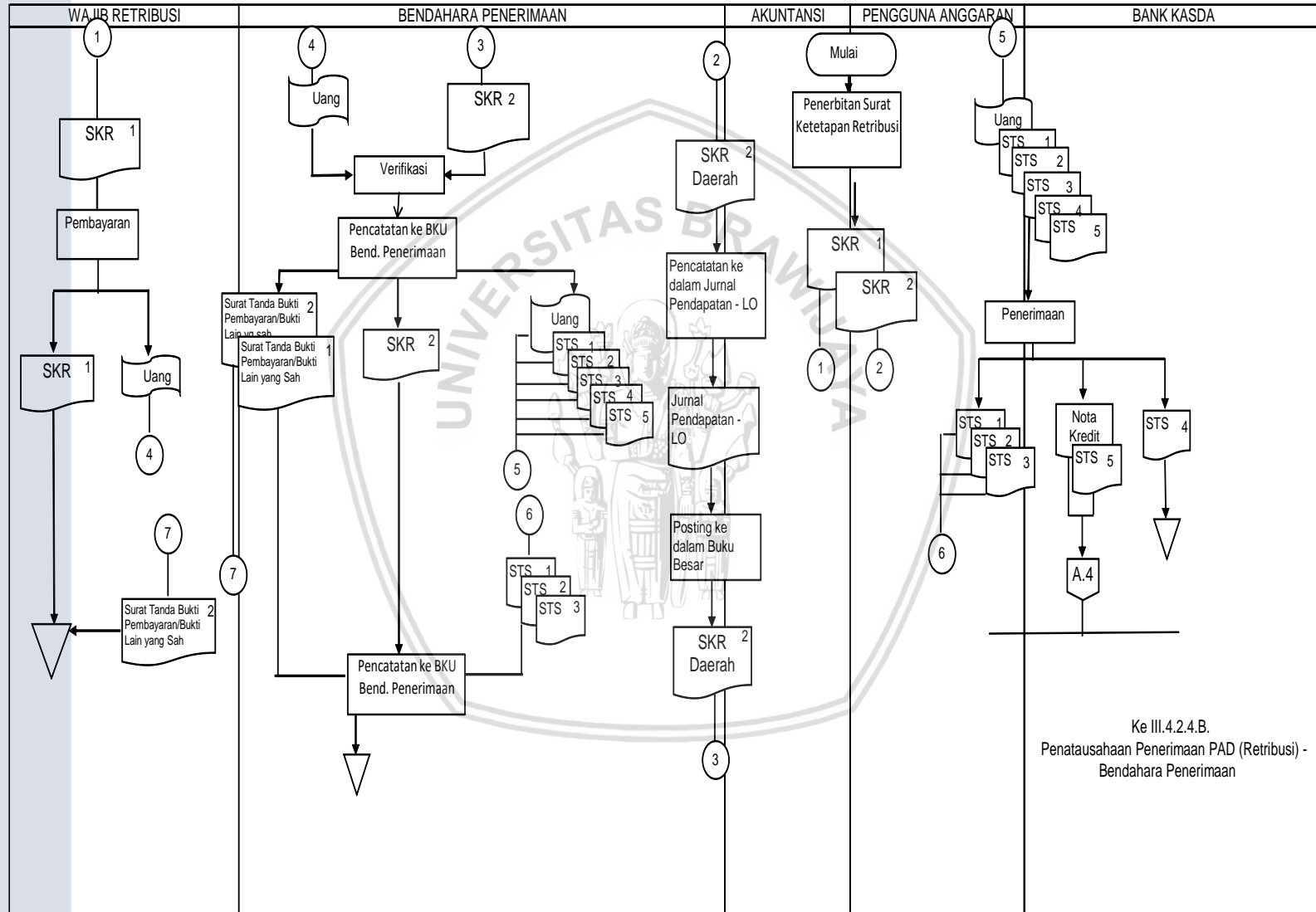


LAMPIRAN

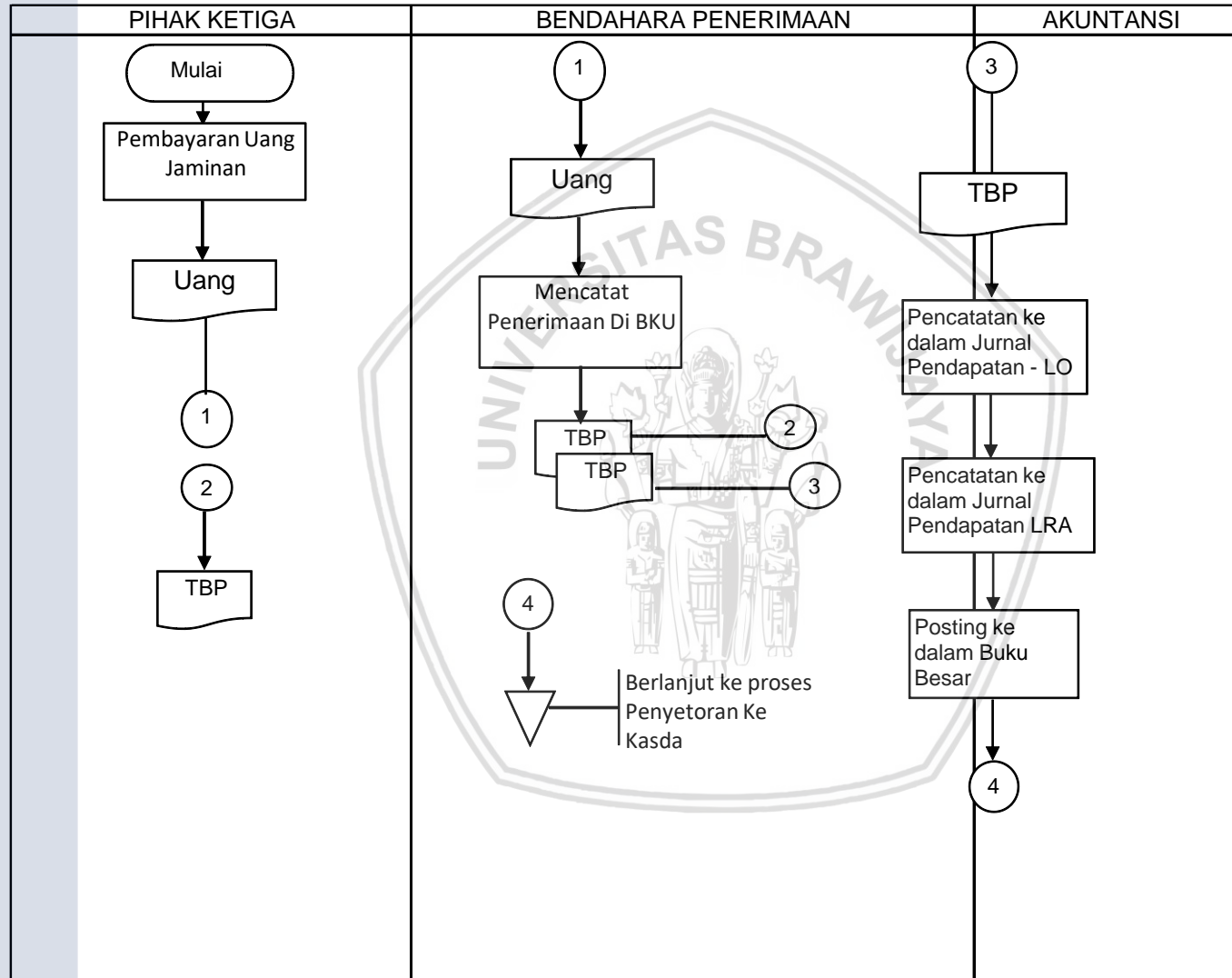
Lampiran 1. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah)-Bendahara Penerimaan



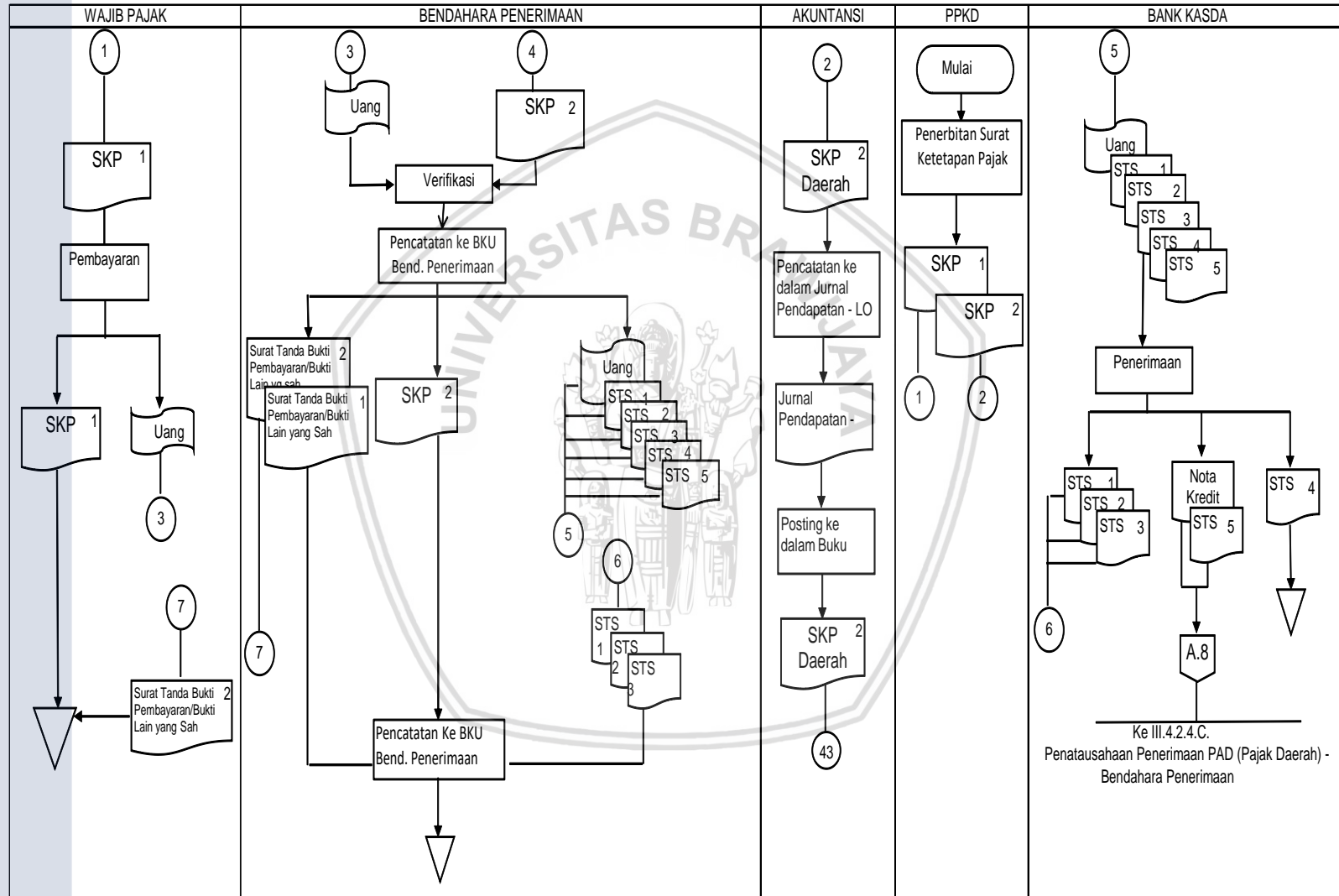
Lampiran 2. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Retribusi)-Bendahara Penerimaan



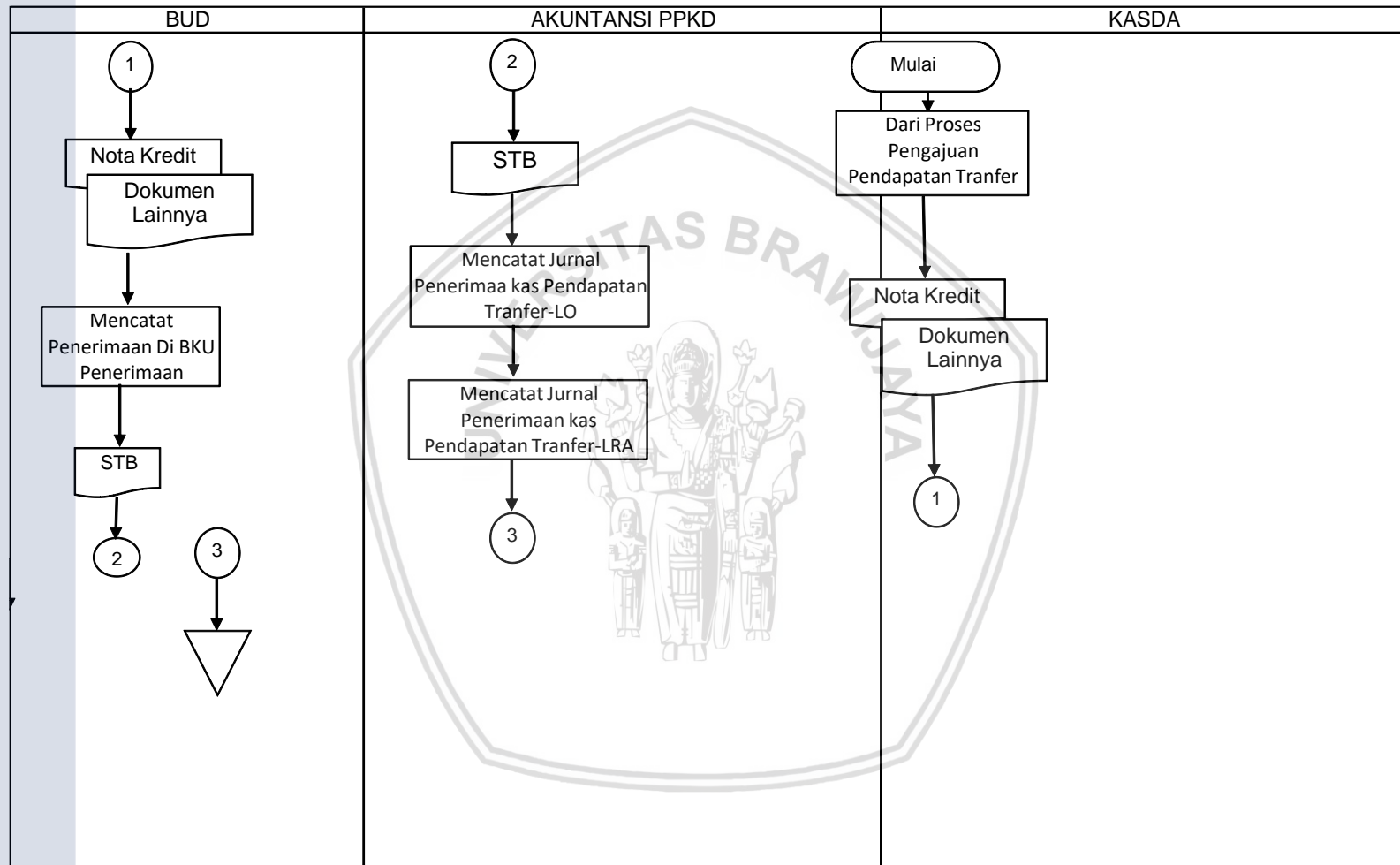
Lampiran 3. Pelaksanaan Hasil Eksekusi Jaminan



Lampiran 4. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah)-Bendahara Penerimaan (PPKD)



Lampiran 5. Pelaksanaan Pendapatan Transfer



Lampiran 6, Tabel Program Utama Rencana Kinerja Tahunan 2016

Program Utama Rencana Kinerja Tahunan 2016

NO.	PROGRAM UTAMA	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	a. Penyusunan Ranc. Perda dan Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD th 2016 b. Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg Penjabaran Perubahan APBD th 2015 c. Penyusunan Ranc. Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaks. APBD d. Penyusunan laporan realisasi anggaran dan capaian kinerja e. Integrasi sistem informasi keuangan pada SKPD f. Penyusunan pedoman kebijakan akuntansi berbasis akrual pada Pemda g. Publikasi pengelolaan keuangan daerah Kab. Pamekasan h. Pembuatan buku pedoman penatausahaan keuangan th. 2016 i. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah j. Pembuatan buku pedoman penyusunan RKA P-APBD 2015 dan APBD 2016 k. Rekonsiliasi nilai asset, penyertaan modal dan peny. Piutang daerah l. Asistensi pengelolaan keuangan dan laporan keuangan m. Pelaksanaan penatausahaan APBD dan P-APBD 2015 n. Sosialisasi penyusunan RKA P-APBD 2014 dan APBD 2015	499.000.000 376.000.000 287.500.000 150.000.000 277.032.000 250.000.000 350.000.000 75.000.000 244.802.000 165.000.000 199.540.000 491.717.000 205.000.000 125.000.000

		o. Penyusunan Ranc. Perda dan Peraturan KDH ttg Penjabaran APBD th 2016	265.000.000
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	a. Penyelesaian kepemilikan atas tanah Pemkab. Pamekasan	250.000.000
		b. Pengelolaan dan pengendalian asset Daerah	150.000.000
		c. Pengamanan asset	50.000.000
		d. Pembuatan dan pemasangan papan	108.000.000

	Nama	
	e. Penghapusan asset inventaris barang Daerah	75.000.000
	f. Pemanfaatan asset inventaris barang Daerah	75.000.000
	g. Pemutakhiran data tanah eks. TKD Kelurahan Kangeran	50.000.000

Tabel B.1.3

Program Penunjang Rencana Kinerja Tahunan 2016

NO.	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	a. Pendukung pelayanan administrasi perkantoran b. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah c. Perencanaan monitoring dan evaluasi DAU d. Perencanaan monitoring dan evaluasi DAK	917.525.000 200.000.000 197.220.000 308.875.000
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	a. Pengadaan kendaraan dinas operasional b. Pengadaan peralatan gedung kantor c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional d. Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor dan rumah dinas e. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan gedung kantor dan rumah dinas f. Pembuatan pagar kantor g. Permbuatan tandon air h. Pembangunan Gudang Barang	217.000.000 137.500.000 163.479.000 104.000.000 42.500.000 125.000.000 40.000.000 1.992.440.000
3.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.	a. Penyusunan standart satuan harga tahun anggaran 2016 b. Pemeliharaan dan pengembangan SIM gaji c. Pendukung pengelolaan pelayanan gaji pegawai	100.000.000 200.750.000 203.031.400



